

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MENINGKATKAN IMUNITAS MASYARAKAT PAPUA
UNTUK MEMPERKOKOH INTEGRASI BANGSA**

OLEH
FRENKY RIUPASSA, S.Sos., M.Han.
KOLONEL INF NRP 1900012710768

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LX
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmad dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX tahun 2020, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul "**Meningkatkan Imunitas Masyarakat Papua Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa**".

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LX tahun 2020 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Yth. Gubernur Lemhannas RI Bapak Letnan Jendral TNI (Purn) Agus Widjojo** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LX di Lemhannas RI TA. 2020.
2. **Tutor pembimbing Taskap Bapak Dr Djoharis Lubis, M.Sc.** yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi yang konstruktif dalam suksesnya penulisan Taskap ini.

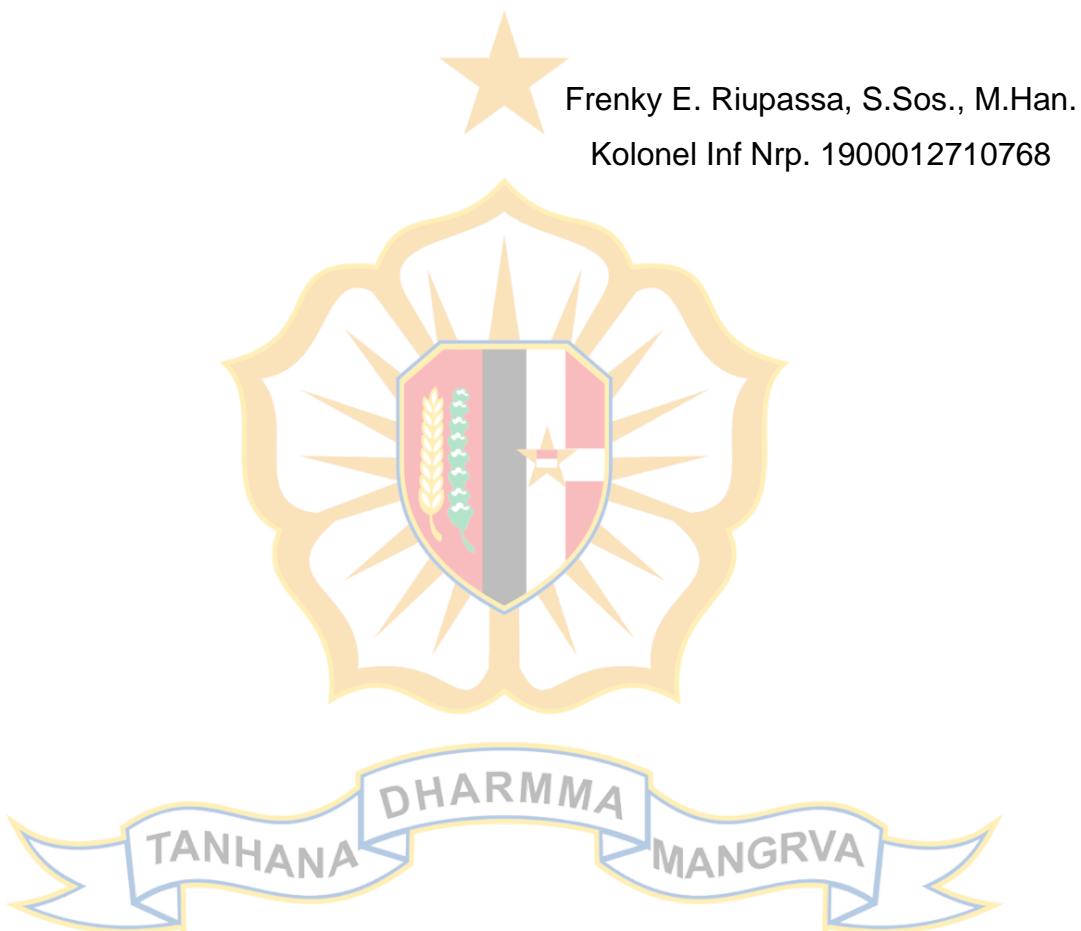
Selanjutnya ucapan terimakasih juga, penulis sampaikan kepada rekan-rekan Peserta PPRA LX Lemhannas RI TA. 2020 atas dukungan dan kerjasamanya yang tulus dan ikhlas. Tak lupa pula kepada isteri, anak, dan keluarga serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas dorongan semangat dan moril yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Taskap ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Taskap ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah, bimbingan, petunjuk dan lindungannya kepada kita semua. Aamiin

Jakarta, Juli 2020

Penulis



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frenky E. Riupassa, S.Sos.,M.Han.
Pangkat : Kolonel Infanteri.
Jabatan : Irdam XVIII/Kasuari.
Instansi : Kodam XVIII/Kasuari.
Alamat : Jl. Sutera Palma XVIII, No.16 Tangerang Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang Saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2020
Penulis Taskap

Frenky E. Riupassa, S.Sos.,M.Han
Kolonel Inf Nrp 1900012710768

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-undangan	10
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data dan Fakta	15
11. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis	18
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	22
13. Faktor Penyebab Rendahnya Imunitas Masyarakat Papua	23
14. Apa Akibat Rendahnya Imunitas Masyarakat Papua	31
15. Bagaimana Menghilangkan Faktor Penyebab dan Akibat	40

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	53
--------------------	----

DAFTAR PUSTAKA :**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR GAMBAR/PETA
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- TABEL 1 : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN DAN KOTA DI PAPUA TAHUN 2019

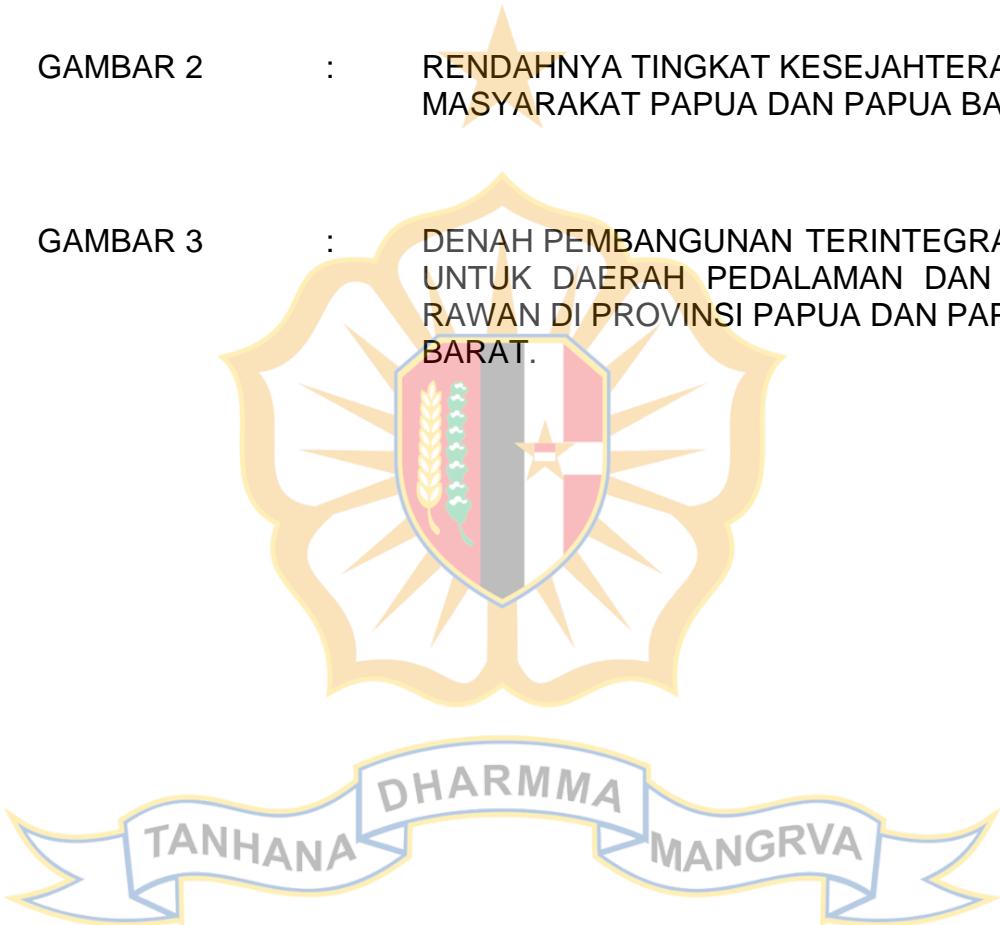


DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR 1 : RENDAHNYA IMUNITAS MASYARAKAT PAPUA DAN PAPUA BARAT.

2. GAMBAR 2 : RENDAHNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA DAN PAPUA BARAT.

3. GAMBAR 3 : DENAH PEMBANGUNAN TERINTEGRASI UNTUK DAERAH PEDALAMAN DAN DAERAH RAWAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**MENINGKATKAN IMUNITAS MASYARAKAT PAPUA
UNTUK MEMPERKOKOH INTEGRASI BANGSA**

OLEH

FRENKY RIUPASSA, S.Sos.,M.Han.
KOLONEL INF NRP 1900012710768

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LX
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

Jakarta Juli 2020
Deputi Pendidikan
Pimpinan Tingkat Nasional

Rahmat Pribadi
Mayor Jenderal TNI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Papua merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), letak geografis berada paling timur Indonesia. Secara hukum nasional terintegrasi melalui UU Nomor 15 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Irian Barat yang selanjutnya diikuti oleh perubahan peraturan lainnya. Secara nyata sebenarnya Papua telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah mendengar adanya proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno Hatta, secara perlahan muncul adanya pergerakan nasionalisme Indonesia oleh putra-putra asli Papua yang pernah menngenyam pendidikan di sekolah pamong praja Holandia seperti Frans Kaisepo dan Marten Indey dengan membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM)¹. Sebenarnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai dengan prinsip hukum internasional “*Uti Possidetis Juris*”, dalam konteks negara Indonesia merdeka, wilayahnya merupakan wilayah yang dulunya dibawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda.

Belanda awalnya tidak rela begitu saja melepaskan wilayah Hindia Belanda yang telah lama dikuasainya. Namun akhirnya harus mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah Hindia Belanda melalui persetujuan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949. Belanda berusaha mempertahankan Papua sebagai bagian dari wilayahnya, melalui konstitusi ingin memasukkan Papua menjadi Provinsi terluar kerajaan Belanda. Kemudian pada saat terdesak Belanda membentuk sebuah negara boneka Papua (bom waktu). Selanjutnya melalui Pepera dan Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 November 1969 secara *de facto* dan *de jure* sudah tidak terbantahkan bahwa Papua bagian integral dari Negara kesatuan Republik

¹ [https://tirto.id/Frans Kaisiepo sejarah perjuangan seorang Papua untuk Indonesia blow](https://tirto.id/Frans-Kaisiepo-sejarah-perjuangan-seorang-Papua-untuk-Indonesia-blow) /Diunduh pada tanggal 5-03-2020 pukul 19.00 WIB.

Indonesia (NKRI). Namun akibat dari bom waktu yang ditinggalkan Belanda beberapa putra-putra Papua yang dulunya mengenyam pendidikan di sekolah pamong praja Holandia yang menolak integrasi dengan Bangsa Indonesia, kemudian membentuk Organisasi Papua Merdeka pada tanggal 1 Juli 1971 seperti Nicolas Jouwe, Set Jafeth Roemkorem dan Jakob Hendrik yang mendeklarasikan Republik Papua Barat². Dengan tujuan ingin melepaskan Papua dari NKRI sehingga disebut gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Gerakan KKB dalam melakukan aksi gangguan keamanan sering kali melanggar kemanusiaan, sebagai contoh peristiwa pembantaian Nduga terjadi pada tanggal 2 Desember 2018, menewaskan 31 pekerja PT Istaka Karya³ dan 1 orang prajurit TNI dari Batalyon 755/Yalet saat melindungi pekerja PT Istaka Karya yang berlindung di pos pengamanan tersebut. Pada bulan Mei 2019 seorang tersangka pelaku peristiwa pembantaian tersebut bernama Mispo Gwijangge ditangkap oleh Polres Jayawijaya merupakan warga Distrik Yigi Kabupaten Nduga yang masih di bawah umur⁴. Tersangka direkrut oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya. Melihat fakta tersebut menunjukkan kuatnya kemampuan pihak separatis OPM dalam merekrut anggota dari generasi muda. Ini menunjukkan masih lemahnya imunitas masyarakat Papua dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Nduga dalam mengadapi upaya propaganda KKB.

Peristiwa selanjutnya, aksi solidaritas sebagai dampak dari peristiwa ujaran kebencian di Surabaya yang berkembang menjadi kerusuhan massa juga terjadi di kota-kota seperti Wamena, Jayapura, Sorong, Timika, Nabire, Fakfak serta kota-kota lainnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Aksi solidaritas dan kerusuhan di Fakfak disertai dengan pengibaran bendera bintang kejora (berdera lambang KKB), namun kegiatan tersebut mendapat perlawanan dari kelompok pedagang pasar

² [https://histori.id/sejarah organisasi Papua Merdeka OPM /](https://histori.id/sejarah-organisasi-papua-merdeka-OPM/)Diunduh pada tanggal 5-03-2020 pukul 19.00 WIB.

³ [https://makassar.terkini.id/kejam 31 pekerja jalan trans Papua dibunuh kkb /](https://makassar.terkini.id/kejam-31-pekerja-jalan-trans-papua-dibunuh-kkb/)Diunduh pada tanggal 5-03-2020 pukul 19.00 WIB.

⁴ [https://metro.tempo.co/read/1303604/terdakwa penembak karyawan PT Istaka karya diduga di bawah umur /](https://metro.tempo.co/read/1303604/terdakwa-penembak-karyawan-pt-istaka-karya-diduga-di-bawah-umur/)Diunduh pada tgl 5-03-2020 pkl 19.00 WIB.

yang menjadi korban kerusuhan serta kelompok barisan merah putih yang meminta bendera bintang kejora diturunkan. Dan dampak selanjutnya dari peristiwa ujaran kebencian di Surabaya dengan aksi kekerasan terhadap masyarakat pendatang terjadi di Wamena Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, pertokoan, perumahan masyarakat serta menimbulkan korban jiwa sebanyak 33⁵ orang dan ribuan masyarakat mengungsi.

Peristiwa gangguan keamanan dan kerusuhan massa yang selalu dilakukan oleh KKB menyebabkan terhambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari data badan pusat statistik (BPS) Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) terendah dibanding provinsi lain di Indonesia. Data BPS menunjukkan IPM Provinsi Papua 60,06 merupakan terendah pertama dan Provinsi Papua Barat 63,74 terendah kedua pada skala nasional⁶. Padahal visi pemerintah dalam pembangunan Papua/Papua Barat pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) tahun 2005 – 2025 harus mencapai pembangunan yang setara dengan Provinsi lain di Indonesia. Untuk mewujudkannya tidak ada alternatif lain kecuali pembangunan harus terus berjalan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil dan tertinggal. Diharapkan dengan peningkatan kesejahteraan dapat meningkatkan imunitas atau daya tahan masyarakat Papua dari pengaruh ideologi KKB yang menginginkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Dari fakta tersebut diatas, menunjukkan lemahnya imunitas masyarakat Papua dalam membentengi diri dari upaya pengaruh pihak KKB. Apabila pemerintah bersama-sama masyarakat tidak mengambil langkah-langkah strategis dalam membentengi masyarakat Papua terhadap propaganda yang dilakukan oleh KKB. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Papua dan menjaga stabilitas keamanan maka akan mengganggu keutuhan

⁵ [https://www.cnnindonesia.com/nasional/201910282046-02-20-443648/polisi sebut 33 korban tewas diwamena akibat kerusuhan](https://www.cnnindonesia.com/nasional/201910282046-02-20-443648/polisi-sebut-33-korban-tewas-diwamena-akibat-kerusuhan) /Diunduh pada tanggal 5-03-2020 pukul 19.00 WIB.

⁶ <https://ipm.bps.go.id/data/nasional/> Diunduh pada tanggal 4-03-2020 pukul 19.30 WIB.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pembahasan diatas maka harus ada strategi untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan masyarakat Papua guna memperkokoh integrasi nasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu adanya pengambilan langkah-langkah yang strategis guna meningkatkan imunitas atau daya tahan agar dapat membentengi masyarakat Papua dari usaha-usaha KKB dalam mempengaruhi secara ideologi dan merekrut masyarakat untuk dijadikan bagian dari perjuangannya. Dengan demikian yang menjadi rumusan masalah adalah : **“Bagaimana Meningkatkan Imunitas Masyarakat Papua Untuk Memperkokoh Integrasi Nasional”** dari rumusan masalah tersebut terdapat beberapa pokok bahasan antara lain :

- a. Apa saja yang menjadi faktor penyebab rendahnya imunitas masyarakat Papua untuk memperkokoh integrasi nasional.
- b. Apa akibat rendahnya imunitas masyarakat Papua untuk memperkokoh integrasi nasional.
- c. Bagaimana menghilangkan faktor penyebab dan akibat rendahnya imunitas masyarakat Papua untuk memperkokoh integrasi nasional.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud. Mencari tahu apa faktor-faktor penyebab dan akibat rendahnya imunitas masyarakat Papua sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya meningkatkan imunitas masyarakat Papua terhadap upaya propaganda kelompok KKB untuk memperkokoh integrasi nasional.

b. Tujuan. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menangani upaya disintegrasi bangsa di Papua yang dilakukan oleh KKB.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup. Pembahasan pada tulisan ditinjau dari aspek kesejahteraan dengan titik berat faktor pendidikan formal dan informal, kesehatan, ekonomi dan aspek keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat terutama pada daerah pedalaman.

b. Sistematika. Tulisan ini disusun dengan tata urut, sebagai berikut :

1) Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah Papua, latar belakang integrasi Papua serta upaya disintegrasi Papua oleh KKB, serta beberapa fakta peristiwa kerusuhan agar pembaca memahami latar belakang penulisan, permasalahan secara umum yang akan dibahas, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan tata urut, metode dan pendekatan serta pengertian-pengertian.

2) Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini memberikan gambaran tentang berbagai landasan perundang-undangan sebagai dasar dalam penulisan, dilengkapi dengan data dan fakta dan teori-teori sebagai pisau analisis, serta pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap upaya disintegrasi wilayah Papua.

3) Bab III Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang apa penyebab rendahnya imunitas masyarakat Papua untuk memperkokoh integrasi nasional, serta apa akibatnya dan bagaimana menghilangkan faktor penyebab dan akibat rendahnya imunitas masyarakat Papua untuk memperkokoh integrasi nasional.

4) Bab IV Penutup. Pada bab ini berisi simpulan dari tulisan secara keseluruhan disertai rekomendasi berupa saran untuk ditindaklanjuti dalam rangka “Meningkatkan Imunitas Masyarakat Papua untuk Memperkokoh Integrasi Nasional”.

5. Metode dan Pendekatan

- a. Metode. Pembahasan dan penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif yaitu melakukan analisa dengan menguraikan permasalahan disintegrasi bangsa di wilayah Papua berdasarkan kondisi objektif dan data-data dari literatur yang diperoleh penulis, serta pengalaman langsung selama bertugas di wilayah Papua.
- b. Pendekatan. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengemukakan data dan fakta hasil studi kepustakaan.

6. Pengertian.

- a. Imunitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Kekebalan⁷, dalam konteks penulisan ini kekebalan mempunya arti daya tahan terhadap upaya-upaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa.
- b. Daya Tahan. Suatu kemampuan untuk bertahan atas segala pengaruh yang datang dari luar yang sifatnya bisa merugikan seperti penyakit, godaan, serangan dari musuh⁸.
- c. Tolok Ukur. Sesuatu yang dipakai sebagai dasar mengukur (menilai, dan sebagainya), patokan, standar⁹. Dalam Taskap ini ukuran yang digunakan untuk mengukur imunitas, indikatornya adalah data badan pusat

⁷ <https://jagokata.com/arti kata/imunitas.html> /Diunduh pada tanggal 7-03- 2020 pukul 16.00 WIB.

⁸ <https://lektur.id/arti daya tahan/>Diunduh pada tanggal 7-03-2020 pukul 16.00 WIB.

statistik (BPS) tentang indeks pembangunan manusia (IPM) atas dasar tiga indikator utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang di bahas secara kualitatif.

d. Masyarakat Papua. Masyarakat yang tinggal di wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat.

e. Integrasi. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional¹⁰.

f. Otonomi Khusus. Kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua¹¹.

g. Orang Asli Papua. Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan orang yang diterima atau diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua¹².

h. Separatis. Orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan¹³.

i. Sinergi. Kegiatan atau operasi gabungan¹⁴ hubungan, kerjasama atau operasi gabungan, diartikan disini sinergi adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan yang lebih baik dan lebih besar dari pada dikerjakan sendiri.

⁹ <https://www.kamusbesar.com/tolok ukur /Diunduh pada tanggal 8-03-2020 pukul 22.00 WIB.>

¹⁰ <https://kbbi.web.id/integrasi /Diunduh pada tanggal 8-03-2020 pukul 22.00 WIB.>

¹¹ <https://kbbi.web.id/integrasi /Diunduh pada tanggal 8-03-2020 pukul 22.00 WIB.>

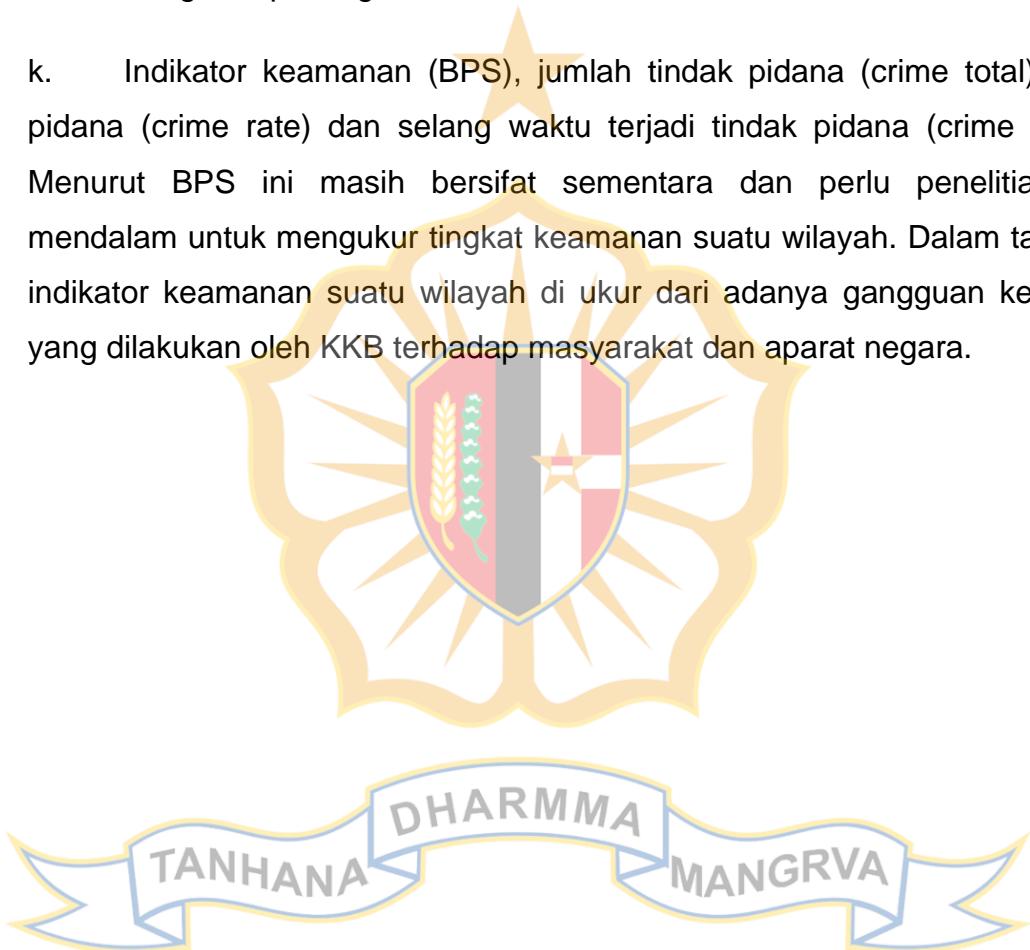
¹² <https://suara papua.com/2020/05/22/evaluasi otsus papua /Diunduh pada tanggal 8-03-2020 pukul 22.00 WIB.>

¹³ <https://kbbi.web.id/separatis /Diunduh pada tanggal 8-03-2020 pukul 22.20 WIB.>

¹⁴ <https://jagokata.com/arti kata/sinergi.html/ Diunduh pada tanggal 8-03-2020 pukul 22.20 WIB.>

j. Pembangunan. Infrastruktur pembangunan prasarana¹⁵, pada penulisan ini pembangunan terintegrasi adalah pembangunan yang dilakukan atas dasar pertimbangan kondisi keamanan dan kondisi geografi di suatu wilayah sebaiknya dibangun secara terintegrasi antara instansi pemerintah dan Institusi TNI/Polri agar dapat digunakan secara maksimal.

k. Indikator keamanan (BPS), jumlah tindak pidana (crime total), angka pidana (crime rate) dan selang waktu terjadi tindak pidana (crime clock)¹⁶. Menurut BPS ini masih bersifat sementara dan perlu penelitian lebih mendalam untuk mengukur tingkat keamanan suatu wilayah. Dalam taskap ini indikator keamanan suatu wilayah diukur dari adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat dan aparat negara.



¹⁵ <https://kbbi.web.id/pembangunan/> Diunduh pada tanggal 8-03-2020 pukul 22.30 WIB.

¹⁶ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/2013/> Diunduh pada tanggal 21-06-2020 pukul 20.30 WIB.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Papua menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki sejarah yang panjang dalam upaya mengembalikan wilayah yang dulunya merupakan wilayah di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, yang dikenal dengan sebutan *Nederlands Nieuw Guinea*. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mengembalikan Papua kedalam wilayah Republik Indonesia sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajah untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Perjuangan yang mengorbankan patriot bangsa membuat hasil dengan diakui secara hukum internasional bahwa Papua merupakan bagian integral dari Indonesia, namun permasalahan bukan berhenti sampai disitu, Belanda meninggalkan bom waktu hingga terjadinya konflik berkepanjangan sampai dengan sekarang.

Memperhatikan hal tersebut, sebenarnya permasalahan wilayah Papua secara politik sudah selesai, dalam arti status Papua dalam ketatanegaraan sudah jelas menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Namun integrasi nasional di wilayah paling timur Indonesia tersebut tidak sesederhana itu, melainkan masih ada KKB yang tetap berusaha mempermasalahkan integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan berbagai alasan mereka ingin mendirikan negara sendiri yang lepas dari Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh KKB bukan hanya bersifat lokal kedaerahan dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM, kemiskinan dan pelurusan sejarah (Pepera), juga berusaha untuk internasionalisasi konflik Papua melalui lobi-lobi internasional baik dengan negara-negara Melanesia maupun melalui lembaga internasional.

Memperhatikan hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam, melainkan menjawab permasalahan isu-isu tersebut dengan tindakan nyata yang dilakukan

baik oleh pemerintah pusat melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maupun pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kota menunjukkan adanya kehadiran negara dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik Papua, adanya pemberian hak otonomi khusus bagi wilayah Papua melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, yang memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Di dalam Bab II ini akan diuraikan Peraturan Perundang-undangan yang akan dijadikan landasan hukum dalam membahas bab-bab selanjutnya, kerangka teoritis sebagai instrumen analisisnya, fakta dan data yang mendukung penulisan taskap ini serta lingkungan strategis yang harus diperhatikan baik global, regional dan nasional.

8. Peraturan Perundang-undangan

a. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua

Undang-undang otonomi khusus Papua merupakan bentuk kebijakan pemerintah pusat untuk merespon permasalahan yang terjadi di tanah Papua, antara lain dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua/Papua Barat dan provinsi lain dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (paragraf menimbang pada huruf h). Masalah kesejahteraan juga di cantumkan dalam Pasal 14 tentang kewajiban Gubernur yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan rakyat Papua dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat¹⁷.

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4321/UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua/Diunduh pada tanggal 8-03-2020 pukul 22.30 WIB>.

b. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Pada Bab I, pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya bab IX pasal 35 menjelaskan standar nasional pendidikan yang diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 19 tahun 2005, pasal 1 menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi, serta sumber belajar lain yang menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi¹⁸.

c. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Latar belakang yang menjadi pertimbangan disahkannya undang-undang Republik Indonesia tentang kesehatan adalah bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (paragraf menimbang pada huruf a). Pada Bab II pasal 2 menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma agama¹⁹.

¹⁸ <http://hukum.unsrat.ac.id//UU 2003.htm>/Diunduh pada tanggal 8-03-2020 pukul 22.30 WIB.

¹⁹ <http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/2016/10/ Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan.pdf>/ Diunduh pada tgl 8-03-2020 pkl 22.40 WIB

d. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (paragraf menimbang pada huruf b). Pada Bab I pasal 1 menjelaskan kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat²⁰. Keberadaan pemerintah daerah membantu pemerintah pusat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya pemerintah daerah akan lebih terasa akan kehadiran negara dalam rangka melindungi warga negara serta membantu kesulitan warga negara dalam mewujudkan kesejahteraannya.

e. UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pertahanan negara adalah usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara (paragraf menimbang huruf b) Pada Bab IV pasal 7 ayat 2, menyatakan sebagaimana tugas pokok yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan a. Operasi militer untuk perang, b. Operasi militer selain perang yaitu 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata, 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata, 9) Membantu tugas pemerintah daerah, 4) Mengamankan wilayah perbatasan, 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

²⁰ <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf> /Diunduh pada tgl 15-03-2020 pkl 18.30 WIB

rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang²¹.

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Manajemen Konflik.

Minnery (1980:220) mendefinisikan manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya interatif, dimana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal dan representatif²². Model yang ideal dalam menangani konflik di Papua adalah pendekatan *ACES* (*Asses the situation, Clarify the Issues, Evaluate Alternative Aproaches, solve the problem*).

b. Teori Ketahanan Nasional.

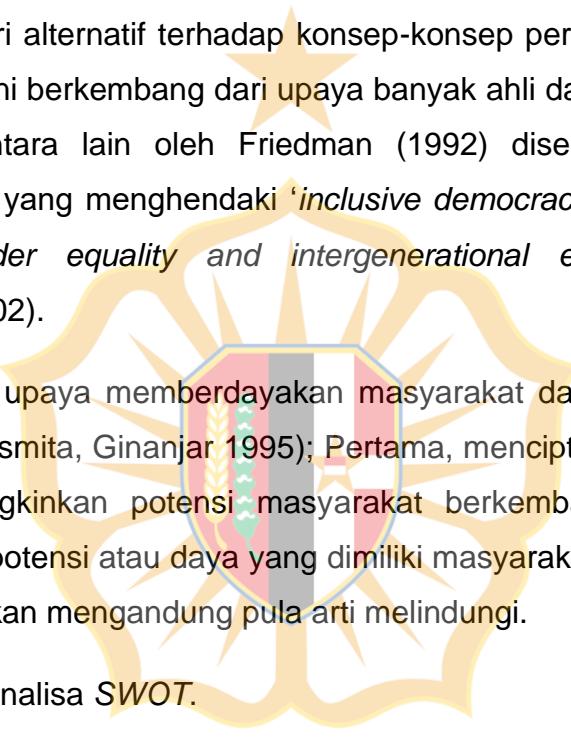
Ketahanan Nasional menurut Harjomataram adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional²³.

c. Teori Pemberdayaan Masyarakat²⁴.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan

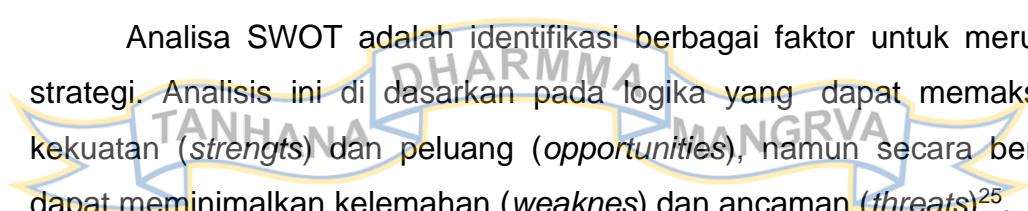
²¹ [²² \[²³ \\[²⁴ Agus Purbathin Hadi, Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan.\\]\\(http://nuruldw18.blogspot.com/2015/05/ketahanan-nasional.html16-07-2020 pukul 21.32 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=\\)\]\(https://kotakpintar.com/manajemen konflik /Diunduh pada tanggal 16-03-2020 pukul 20.30 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=\)](https://www.jogloabang.com/pustaka/UU No. 34 tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia /Diunduh pada tanggal 15-03-2020 pukul 18.30 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=)

paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering and sustainable*” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki ‘*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*’ (Sumodiningsrat, Gunawan, 2002).



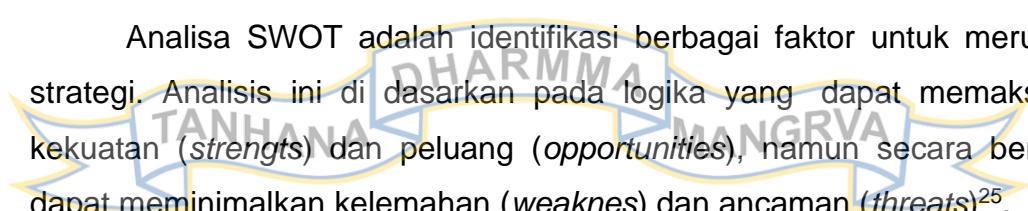
Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Kartasasmita, Ginanjar 1995); Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

d. Teori Analisa SWOT.



Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi. Analisis ini di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*)²⁵.

e. Teori Quintuple Helix.



Sebuah konsep yang merupakan pengembangan dari Konsep *Penta helix* yang digagas oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), Konsep pembangunan infrastruktur dengan melibatkan akademisi, pengusaha, media,

²⁵ <https://www.jurnal.id/id/blog/2017> manfaat faktor yang memengaruhi dan contoh analisis swot/Diunduh pada tanggal 17-03-2020 pukul 18.30 WIB.

masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam dalam suatu proses pengembangan serta pembangunan suatu daerah²⁶

10. Data dan Fakta

Data kejadian tahun 2019–2020 yang di peroleh dari pusat intelejen Angkatan Darat menunjukkan aktivitas KKB dalam melakukan kegiatan mengganggu keamanan untuk menunjukkan eksistensi perjuangannya dengan tujuan ingin merdeka. Kegiatan propaganda terhadap anak-anak dan masyarakat sehingga menjadi bagian dari KKB tersebut, menunjukkan rendahnya imunitas masyarakat Papua terhadap pengaruh ideologi KKB.

- a. Pada tanggal 28 Januari 2019, terjadi kontak tembak antara Satgas Pamrahan Yonif 751/RK dengan KKB yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia a.n. Praka Nasrudin anggota Yonif 751 di Distrik Mapendumua Kabupaten Nduga Provinsi Papua.
- b. Pada tanggal 2 Februari 2019 terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB di kios bapak Nending Talenggeng pemilik rumah Jl. Mirkambut Kampung Wuyuneri Distrik Mulia Kabupaten Puncak, yang mengakibatkan korban a.n. Sugen Ependi, suku Probolinggo, meninggal dunia, dilakukan oleh kelompok Leri Mayu.
- c. Pada tanggal 17 September 2019 diperoleh selebaran tentang pernyataan Pers dewan adat Papua yang mendesak Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat untuk menghentikan proses pemeriksaan terhadap para demonstran di tanah Papua.
- d. Pada tanggal 26 September 2019 di Kampung Amunggi Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB dari kelompok Lery Mayu (kelompok Yambi) terhadap tukang ojek di

²⁶https://lemlit.unla.ac.id/wp_content/uploads/2019/12/7.Widjajani-Model Quadruple Helix.pdf/ Diunduh pada tanggal 16-07-2020 pukul 21.30 WIB.

Ilaga a.n Sattiar B dan Laode Alwi yang menyebabkan kedua korban meninggal dunia.

e. Pada hari Sabtu tanggal 28 September dan Minggu tanggal 29 September 2019 di Kabupaten Puncak, telah terjadi aksi penyerangan terhadap Posko Satgas Ops Nemangkawi di Ilaga dan pembakaran rumah masyarakat di Kampung Kimak oleh KKB dan Kontak tembak antara Satgas Ops Nemangkawi dengan KKB.

f. Pada hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2020, bertempat di terminal UPBU Bandara Moses Kilangin Timika, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua, telah dilaksanakan proses evakuasi terhadap 3 orang guru SD Inpres Baluni yang di sandera oleh sekitar 50 orang KKB pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, Bertempat di Kp. Jagamin²⁷.



Gambar 1. Menunjukkan akibat dari rendahnya imunitas masyarakat Papua, anak-anak terpengaruh propaganda KKB di Kabupaten Nduga²⁸

²⁷ Data berdasarkan dukumen Pusintelad tentang kegiatan separatis Papua tahun 2018-2020.

²⁸ <https://www.matamatapolitik.com/siklus-balas-dendam-bergabungnya-anak-anak-ke-pasukan-opm/> Diunduh pada tanggal 4-5-2020 pukul 19.30 WIB.

Disamping adanya gangguan keamanan, tingkat pendidikan dan kesehatan masih jauh tertinggal terutama di daerah terpencil akibat kondisi geografi yang sulit dijangkau yang berdampak pada minimnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, demikian juga dengan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Data dari United Nations Children's Fund (Unicef) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP. Di pedalaman sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah, masalah ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan Papua dan Papua Barat memiliki nilai paling rendah diantara seluruh provinsi di Indonesia, dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) 2010-2015. Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di Indonesia adalah 69,55.²⁹ Sedangkan Tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah masih dipegang oleh Papua dengan angka 60,84 jauh di bandingkan dengan DKI dengan angka 80,76.³⁰



Gambar 2. Menunjukkan kehidupan masyarakat masih belum sejahtera yang menyebabkan rendahnya imunitas masyarakat Papua

²⁹ [https://www.beritasatu.com/nasional/pendidikan masih jadi masalah utama dipapua](https://www.beritasatu.com/nasional/pendidikan-masih-jadi-masalah-utama-dipapua) /Diunduh pada tanggal 4-3-2020 pukul 16.00 WIB.

³⁰ [https://tirto.id/indeks pembangunan manusia 2019 dibawah target papua terparah](https://tirto.id/indeks-pembangunan-manusia-2019-dibawah-target-papua-terparah)/Diunduh pada tanggal 10-3-2020 pukul 17.00 WIB.

11. Lingkungan Strategis

a. Umum

Perkembangan lingkungan strategis selalu membawa pengaruh positif atau negatif maupun sebaliknya bersamaan dampaknya, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan situasi nasional. Pengaruh positif akan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional yaitu mendukung tujuan nasional bangsa, sedangkan pengaruh negatifnya dapat menyebabkan meningkatnya potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara bahkan bisa berdampak terhadap disintegrasi nasional. Masalah konflik Papua yang berkepanjangan juga dipengaruhi adanya lingkungan strategi baik internasional, regional, maupun nasional, sehingga para pihak untuk kepentingannya berusaha internasionalisasi konflik tersebut. Welch dan Luastarien (1988) mengemukakan bahwa internasionalisasi merupakan sebuah konsep yang dinamis, yaitu proses meningkatkan operasi internasional baik keluar maupun kedalam, dengan demikian internasionalisasi adalah suatu proses dinamis dari sebuah entitas memasuki fase global atau mendunia. Upaya internasionalisasi permasalahan atau konflik nasional termasuk konflik Papua pada era globalisasi saat ini sangat mudah dengan didukung adanya keterbukaan serta kemajuan teknologi informasi yang memudahkan setiap individu maupun kelompok untuk menerima ataupun mengirimkan informasi. Internasionalisasi konflik Papua dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan baik dari negara-negara kawasan regional maupun internasional serta dukungan dari lembaga PBB.

b. Lingkungan Internasional.

Internasionalisasi masalah Papua oleh pihak nasionalis Papua yang menginginkan Papua berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka,

dilakukan sebelum masa integrasi, dengan mengirimkan surat ke Sekjen PBB yang isinya memprotes klaim Indonesia atas Papua. Upaya mencari dukungan dari negara-negara lain akan menimbulkan gelombang pergerakan masa yang membangkitkan kembali nasionalisme Papua, begitu ada tanda sedikit adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu maka terjadi peristiwa tuntutan adanya penentuan pendapat rakyat di Papua. Salah satu contoh adalah adanya upaya dari dua anggota Kongres Amerika Serikat yang mengajukan RUU HR 2601, *The State Department Authorization Act for FY 2006*, yang mempertanyakan Papera tahun 1969, seandainya HR tersebut disetujui akan menjadi ancaman serius terhadap integrasi nasional di Papua.

Upaya internasionalisasi konflik Papua terus diupayakan oleh kelompok nasionalis Papua, melalui organisasi *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Benny Wenda, diketahui beberapa kali berusaha menyuarakan isu Papua merdeka ke PBB melalui delegasi dari negara Vanuatu berusaha masuk ke ruang sidang PBB, namun usaha tersebut gagal dengan tidak diijinkan masuk dalam ruang sidang PBB. Diterimanya Benny Wenda menjadi warga kehormatan kota Oxford serta hadirnya Walikota Oxford, Lord Mayor Craig Simmons dalam perayaan peringatan hari manifesit politik bangsa West Papua pada 1 Desember 2019, harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Perjuangan nasionalisme Papua melalui jalur diplomasi dengan menarik simpati negara-negara di dunia agar peduli dengan adanya permasalahan Papua, melalui adanya isu-isu pelanggaran HAM mereka sebarkan berita hoax tentang pelanggaran HAM di Papua. Terpilihnya Indonesia menjadi anggota komisi dewan HAM PBB pada tahun 2019 secara tidak langsung menggugurkan upaya membangun citra buruk Indonesia sebagai negara pelanggar HAM yang dilakukan oleh ULMWP dan Veronika Nyoman. Sebagai anggota komisi dewan HAM PBB membuktikan bahwa tuduhan terhadap adanya pelanggaran oleh Negara Indonesia tidak terbukti, namun harus terus dilakukan.

c. Lingkungan Regional

Masalah Papua juga dibawa kedalam kawasan regional melalui negara-negara sub-regional Melanesia di kawasan Pasifik Selatan, melalui negara-negara kawasan tersebut, ULMWP berusaha memasukkan isu dekolonialisasi dan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua. Melalui negara-negara Melanesia terutama Vanuatu ULMWP berusaha memasukkan perjuangan kemerdekaan Papua Barat melalui organisasi *Melanesian Spearhead Group* (MSG) yaitu organisasi regional di kawasan Melanesia yang terdiri dari negara-negara sub-regional Melanesia di kawasan Pasifik Selatan. ULMWP berusaha menjadi anggota penuh MSG, namun usaha tersebut belum berhasil, saat ini ULMWP mendapatkan status sebagai peninjau dalam organisasi MSG, walaupun usaha untuk menjadi anggota resmi dilakukan sejak 2013.

Vanuatu sejak kemerdekaannya, memiliki kebijakan politik luar negeri selalu menyebabkan konflik dengan Indonesia sebagai contoh undang-undang *Wantok Blong Yumi* (2010) yang menyatakan pengakuan Vanuatu atas kemerdekaan Papua dari Indonesia. Vanuatu telah lama menjalin hubungan dengan organisasi Papua Merdeka, serta mengijinkan negaranya dijadikan basis bagi pergerakan organisasi ULMWP. Dukungan Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat sampai dengan saat ini masih konsisten. Melalui Vanuatu, ULMWP berusaha memasukkan dirinya sebagai anggota penuh MSG, melalui Vanuatu juga ULMWP membawa isu Papua ke dalam sidang umum PBB. Upaya diplomasi Indonesia dalam menghadapi forum negara-negara Pasifik Selatan, dengan melakukan lobi-lobi terhadap negara-negara tersebut, hingga Indonesia secara resmi dapat menjadi salah satu negara anggota MSG. Melalui keanggotaan dalam MSG, pemerintah Indonesia dapat menghambat perjuangan ULMWP, melalui lobi diplomasi kepada negara-negara anggota MSG seperti Fiji dan PNG akan memperkuat

pendapat Indonesia bahwa rakyat Papua sudah diwakili oleh Indonesia dalam MSG.

d. Lingkungan Nasional.

Masalah Papua menjadi suatu ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita nasional yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia. Masalah Papua bila tidak diambil kebijakan strategis yang menguntungkan bagi ketahanan⁺nasional akan menjadi sebuah ancaman bahkan menimbulkan disintegrasi bangsa, bukan hanya wilayah Papua namun bisa mungkin menyebar ke daerah-daerah lainnya. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah kebijakan nasional untuk meredam gejolak di Papua bahkan diharapkan dapat menuntaskan masalah Papua.

Salah satu kebijakan yang sangat strategis dilakukan oleh pemerintah yaitu adanya pemberian otonomi khusus yang memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya. Pemberian hak otonomi khusus dengan dibarengi pemberian dana yang besar bagi pemerintah daerah, kenyataannya tidak pernah menuntaskan permasalahan di Papua, melainkan justru menimbulkan masalah baru antara pejabat daerah dengan masyarakat dalam penggunaan dana otonomi khusus. Kondisi ini dimanfaatkan oleh KKB untuk memuluskan cita-citanya dengan mempengaruhi masyarakat di Papua maupun diluar Papua untuk menyuarakan bahwa otonomi khusus gagal dan harus dikembalikan ke Jakarta dilanjutkan dengan pemberian hak menentukan pendapat bagi orang asli Papua. Hal ini menunjukkan rentannya daya tahan masyarakat Papua terhadap propaganda KKB untuk mencapai tujuan perjuangannya.

BAB III**PEMBAHASAN****12. Umum**

Menyadari pentingnya membangun kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berdasarkan data BPS Provinsi Papua dan Papua Barat indeks pembangunan manusia (IPM) yang terendah di Indonesia. Data BPS tentang IPM yang di gunakan sebagai indikator rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Papua juga di gunakan sebagai indikator rendahnya imunitas masyarakat Papua. Selain kesejahteraan indikator keamanan juga menunjukkan masih ada gangguan keamanan oleh KKB sebagai bentuk penolakan integrasi nasional. Hal ini tentunya menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Masalah kesejahteraan dan keamanan bagi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan khususnya di daerah Papua yang memiliki sejarah integrasi yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan maupun keamanan di Papua dan Papua Barat dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan juga keamanan. Melalui UU Nomor 21 tentang otonomi khusus Papua dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Untuk selanjutnya dalam bab ini, akan dibahas tentang analisa data dan fakta baik sebagai faktor penyebab rendahnya imunitas masyarakat Papua dan akibat dari rendahnya imunitas masyarakat Papua terhadap integrasi nasional serta bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab dan akibat rendahnya imunitas masyarakat Papua.

13. Faktor Penyebab Rendahnya Imunitas Masyarakat Papua Untuk Memperkokoh Integrasi Nasional.

a. Aspek Kesejahteraan

Rendahnya imunitas masyarakat Papua berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan dimana semakin rendah tingkat kesejahteraan, masyarakat akan lebih mudah menerima paham-paham KKB melalui propaganda janji-janji bahwa Papua akan sejahtera bila merdeka terutama masyarakat pedalaman. Untuk memberi gambaran tingkat kesejahteraan terendah pada umumnya berada di daerah pedalaman dapat dilihat tabel BPS tentang data IPM Kabupaten/Kota di Papua sebagai sampel dan ini tidak akan berbeda jauh dengan Kabupaten/Kota yang berada di Papua Barat sebagai berikut ini :

Kabupaten	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Merauke	65.58	66.03	66.28	66.88	67.33	67.75	68.09	68.64	69.38	69.98
Jayawijaya	50.79	51.66	52.27	52.94	53.37	54.18	54.96	55.99	56.82	57.79
Jayapura	67.15	68.04	68.85	69.21	69.55	70.04	70.50	70.97	71.25	71.84
Nabire	64.49	64.96	65.28	65.45	66.25	66.49	66.64	67.11	67.70	68.53
Kepulauan Yapen	63.50	63.82	64.11	64.34	64.89	65.28	65.55	66.07	67	67.76
Biak Numfor	68.22	68.80	69.05	69.35	70.32	70.85	71.13	71.56	71.96	72.57
Paniai	52.57	53.02	53.34	53.70	53.93	54.20	54.34	54.91	55.83	56.58
Puncak Jaya	38.83	40.36	41.85	43.36	44.32	44.87	45.49	46.57	47.39	48.33
Mimika	67.96	68.74	68.95	69.50	70.40	70.89	71.64	72.42	73.15	74.13
Boven Digoel	56.15	56.89	57.45	57.96	58.21	59.02	59.35	60.14	60.83	61.51
Mappi	54.09	54.61	55.09	55.51	55.74	56.11	56.54	57.10	57.72	58.30
Asmat	43.69	44.58	45.08	45.54	45.91	46.62	47.31	48.49	49.37	50.37
Yahukimo	40.63	41.72	43.82	45.63	46.36	46.63	47.13	47.95	48.51	49.25
Pegunungan Bintang	35.45	36.61	37.82	38.94	39.68	40.91	41.90	43.24	44.22	45.21
Tolikara	43.44	44.41	44.86	45.68	46.16	46.38	47.11	47.89	48.85	49.68
Sarmi	56.98	57.96	59.03	59.51	60.48	60.99	61.27	62.31	63	63.45
Keerom	60	60.65	61.13	62.49	62.73	63.43	64.10	64.99	65.75	66.59
Waropen	59.98	60.94	61.32	61.68	61.97	62.35	63.10	64.08	64.80	65.34
Supiori	57.71	58.31	58.86	59.40	59.70	60.09	60.59	61.23	61.84	62.30
Mamberamo Raya	44.89	45.82	46.62	47.28	47.88	48.29	49	50.25	51.24	52.20
Nduga	19.62	21.12	23.07	24.42	25.38	25.47	26.56	27.87	29.42	30.75
Lanny Jaya	41.49	41.90	42.53	43.05	43.28	44.18	45.16	46.49	47.34	48
Mamberamo Tengah	39.37	40.17	41.39	42.43	43.19	43.55	44.15	45.50	46.41	47.23
Yalimo	38.47	40.45	41.84	43.33	44.21	44.32	44.95	46.19	47.13	48.08
Puncak	33.44	35.08	36.85	37.73	38.05	39.41	39.96	41.06	41.81	42.70
Dogiyai	47.48	48.48	50.59	51.46	52.25	52.78	53.32	54.04	54.44	55.41
Intan Jaya	-	40.07	41.89	42.69	43.51	44.35	44.82	45.68	46.55	47.51
Deiyai	-	46.12	46.94	47.74	48.12	48.28	48.50	49.07	49.55	50.11
Kota Jayapura	76.69	76.97	77.25	77.46	77.86	78.05	78.56	79.23	79.58	80.16
Provinsi Papua	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05	59.09	60.06	60.84

Tabel 1. IPM Kabupaten dan Kota Provinsi Papua Tahun 2019³¹

³¹ <a href="https://papua.bps.go.id/dynamictable/2016/08/05/8/metode baru indeks pembangunan manusia menurut kabupaten kota 2010-2019/Diunduh pada tanggal 12-5- 2020 pukul 18.00 WIB.

Dari Tabel tersebut jelas terlihat bahwa kabupaten-kabupaten di daerah pedalaman terutama di pegunungan tengah memiliki IPM terendah dibandingkan dengan kebanyakan Kabupaten/kota di pesisir. Kabupaten Nduga memiliki angka 30,75, merupakan IPM terendah di Papua, walaupun memiliki pertumbuhan IPM tertinggi yaitu 4,52%, disusul Kabupaten Puncak. Padahal Pemerintah Pusat melalui APBN 2019 telah memberi dana Otsus kepada Provinsi Papua sebesar Rp 5,850 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 2,357 triliun, ada juga dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otsus untuk Papua sebesar Rp 2,824 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 1,440 triliun³² dan kalau dilihat dari tahun sebelumnya tidak jauh berbeda jumlahnya. Dana Otsus bila digunakan secara maksimal dapat meningkatkan pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM di Papua dan Papua Barat terutama daerah pedalaman sangat di pengaruhi oleh kondisi geografi dengan medan yang sulit, terbatasnya akses transportasi dan masih adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB, hal ini yang menjadi fokus pembahasan dari faktor penyebab rendahnya imunitas mayarakat Papua.

1) Pendidikan.

- a) Geografi. Masalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Papua, berkaitan dengan kondisi geografi yang sulit dan bervariasi dengan kampung-kampung yang tersebar di daerah pedalaman sehingga sulit dijangkau. Pada daerah-daerah pedalaman serta pegunungan yang terpencil, kondisi ini kelihatan nyata dengan adanya kekurangan gedung sekolah maupun infrastrukturnya. Data Kemendikbud tahun 2018 jumlah sekolah dasar di Provinsi Papua ada 2.641 unit dan Provinsi Papua Barat ada 1.123 unit, bila dibandingkan dengan Provinsi Nusa

³² <https://setkab.go.id/apbn> 2019 pemerintah alokasikan Rp 20979 triliun untuk otonomi khusus aceh papua dan papua barat/Diunduh pada tanggal 12-5-2020 pukul 18.00 WIB.

Tenggara Timur yang jumlah sekolah dasar ada 5.330 unit³³, artinya jumlah sekolah dasar di Provinsi Papua dan Papua Barat lebih sedikit dibanding dengan luas wilayah dan kenyataannya banyak sekolah sudah rusak dan tidak memenuhi standard minimal pendidikan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

- b) Transportasi. Transportasi udara merupakan penunjang utama pembangunan di Papua yang hampir 80% wilayah geografinya adalah pegunungan dengan ketinggian rata-rata 500 hingga 8.000 meter di atas permukaan laut³⁴. Menyebabkan ketersediaan transportasi terbatas apalagi ke daerah pedalaman yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat-pesawat kecil. Hal ini menyulitkan untuk membawa material ke wilayah pedalaman guna pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi ini berbeda dengan daerah perkotaan di pesisir pantai yang mudah dijangkau oleh adanya transportasi laut maupun darat, sehingga fasilitas gedung sekolah maupun infrastrukturnya tersedia dan mudah ditemui. Disamping itu transportasi yang mahal juga sebagai penghambat kehadiran tenaga pendidik di daerah pedalaman.
- c) Tenaga Pendidik. Data Kemendikbud tahun 2018 tenaga pendidik sekolah dasar menurut umur 20-29 tahun, di Provinsi Papua jumlahnya 149 orang dan Provinsi Papua Barat jumlah 67

³³ <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index>/Diunduh pada tanggal 12-5-2020 pukul 18.30 WIB.

³⁴ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/transportasi-udara-penunjang-utama-pembangunan-papua> /Diunduh pada tanggal 15-5-2020 pukul 18.25 WIB.

orang lebih sedikit dibanding dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jumlahnya 879 orang³⁵. Artinya jumlah tenaga pendidik masih kurang dibandingkan dengan jumlah sekolah dan kebanyakan tenaga pendidik berada di daerah perkotaan padahal tenaga guru memiliki peran sangat penting dalam dunia pendidikan.

d) Kondisi keamanan wilayah. Kesulitan yang dihadapi oleh guru disamping kondisi geografi yang memerlukan transportasi yang mahal juga disebabkan oleh kondisi keamanan wilayah sebagai contoh adanya tindakan penyanderaan terhadap guru oleh kelompok separatis KKB. Walaupun secara fisik dapat diselamatkan namun meninggalkan trauma secara psikis bagi guru yang mengalami penyanderaan dan menurunkan minat guru yang lain untuk ditempatkan di daerah pedalaman. Seperti kejadian penyanderaan terhadap guru yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2020 di Kabupaten Mimika terhadap 3 orang guru SD Baluni yang pada akhirnya dibebaskan atas jasa tokoh adat dan tokoh agama Kampung Awarnop³⁶. Pembebasan sandera tersebut memberikan kesadaran akan pentingnya tugas guru sebagai seorang pendidik bagi tokoh adat dan tokoh agama, sehingga menjadi kewajiban mereka untuk melindungi. Namun peristiwa ini tetap menjadi trauma bagi guru yang akan ditempatkan di daerah tersebut.

³⁵ <http://statistik.data.kemdikbud.go.id> /Diunduh pada tanggal 15-5-2020 pukul 20.00 WIB.

³⁶ <https://news.detik.com/berita/ironi/sekolah-di-papua-guru-kurang-malah-disandera/> /Diunduh pada tanggal 29-5-2020 pukul 20.30 WIB.

2) Kesehatan.

- a) Geografi. Masalah pembangunan sarana dan prasarana kesehatan juga sulit, berkaitan dengan kondisi geografi yang bervariasi dengan kampung-kampung yang tersebar di daerah pedalaman sehingga sulit dijangkau. Pada daerah-daerah pedalaman serta pegunungan yang terpencil, kondisi ini kelihatannya adanya kekurangan puskesmas dan infrastrukturnya. Berdasarkan rasio jumlah puskesmas tahun 2018 di Indonesia yang tertinggi adalah DKI Jakarta dengan rasio 7,3 sedangkan Papua dan Papua Barat yang terendah dengan rasio 0,7 puskesmas disetiap kecamatan. Artinya belum semua kecamatan memiliki puskesmas di kedua Provinsi tersebut³⁷. Hal ini sesuai kenyataan Jumlah puskesmas masih kurang. Selain itu penyebarannya belum merata dan kenyataan banyak puskesmas sudah rusak dan tidak memenuhi standard sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b) Transportasi. Berkaitan dengan kontur geografi Papua yang menyebabkan adanya daerah-daerah yang terisolasi karena sulitnya transportasi untuk menjangkau daerah tersebut, sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan berupa puskesmas maupun puskesmas pembantu. Kondisi ini berbeda dengan daerah perkotaan di pesisir pantai yang mudah dijangkau oleh adanya transportasi laut maupun darat, sehingga fasilitas puskesmas maupun infrastrukturnya tersedia dan mudah ditemui.

³⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/12/berapa jumlah puskesmas di indonesia>/Diunduh pada tanggal 29-5-2020 pukul 18.35 WIB.

c) Tenaga kesehatan. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi puskesmas tahun 2010 di Papua masih kekurangan 60% tenaga dokter dan hanya 40% tenaga dokter yang aktif dari 270 puskesmas yang ada di kabupaten/kota se-Papua, padahal menurut buku indikator Indonesia sehat 2010 dibutuhkan 40 dokter per 100.000 jumlah penduduk. Artinya jumlah penduduk di Papua Kurang lebih 2,5 juta maka dokter yang dibutuhkan sekitar 800-an dokter³⁸ sedangkan Papua Barat jumlah dokter 267 dokter³⁹. Penyebaran tenaga kesehatan tersebut juga tidak merata, mereka tersebar di daerah perkotaan yang ramai sedangkan daerah kabupaten di pelosok pedalaman sangat kekurangan tenaga kesehatan baik perawat, bidan maupun dokter. Terlebih tenaga dokter spesialis sangat jauh dari kebutuhan. Otonomi daerah berdampak juga pada adanya pengangkatan tenaga kesehatan yang berasal dari putra asli Papua untuk ditempatkan di daerah pedalaman, namun hal ini terkesan dipaksakan karena tidak memperhatikan kualitas, sehingga keberadaannya di daerah kurang membantu meningkatkan kesehatan masyarakat.

d) Kondisi keamanan keamanan wilayah. Kesulitan yang dihadapi tenaga kesehatan disamping kondisi geografi yang memerlukan transportasi yang mahal juga disebabkan oleh kondisi keamanan wilayah sebagai contoh adanya penembakan oleh KKB terhadap dua orang tenaga medis pada tanggal 22 Mei 2020 di distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya yang menyebabkan

³⁸ https://www.papua.go.id/view_detail_berita/600/puskesmas_di_papua_masih_kekurangan_60_persen_tenaga_dokter.html /Diunduh pada tanggal 30-5-2020 pukul 19.30 WIB.

³⁹ http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/distribusi_sdmk_rs_per_prov/ Diunduh pada tanggal 30-5-2020 pukul 20.00 WIB.

satu orang meninggal dan satu orang kritis⁴⁰. Peristiwa ini juga menjadi trauma bagi tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di daerah pedalaman.

3) Ekonomi

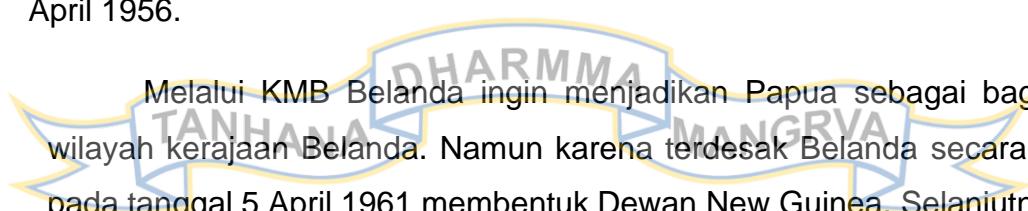
- a) Geografi. Kondisi wilayah yang terpencil dan terisolasi merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemakmuran di daerah pesisir lebih baik dibandingkan dengan daerah pegunungan.
- b) Transportasi. Terbatasnya transportasi ke daerah pedalaman menghambat program-program pembangunan infrastruktur untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi di pedalaman Papua dan Papua Barat guna meningkatkan perekonomian daerah tersebut.
- c) Sumber daya alam. Potensi alam yang berlimpah, tanah yang subur dengan keindahan alam yang mempesona. Namun masyarakat masih tradisional dalam mengolah sektor ekonomi. Sumber daya alam yang ada belum mampu diolah untuk menjadi komoditas ekonomis yang memiliki harga pasar selain untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah.
- d) Kondisi keamanan wilayah. Keamanan wilayah sangat mempengaruhi investor yang akan berinvestasi dan terlibat dalam pengembangan ekonomi daerah termasuk pembangunan infrastruktur, sebagai contoh kejadian penembakan pekerja jalan trans Papua di Kabupaten Nduga. Uraian tersebut menunjukkan

⁴⁰ <https://warkota.tribunnews.com/2020/05/23/kkb-di-papua-tembak-dua-tenaga-medis-covid-19-satu-meninggal-polisi-kini-kejar-pelaku> /Diunduh pada tanggal 30-5-2020 pukul 20.05 WIB.

belum di implementasikan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Aspek keamanan.

Aspek keamanan tidak terlepas dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, Kesadaran pemuda dan pemudi Indonesia sebagai satu bangsa terjadi sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pada tanggal 28 Oktober 1928 pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda mengikrarkan diri sebagai satu kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Bersamaan dengan Sumpah Pemuda tersebut, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan yang menggugah pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan integrasi nasional tidak mudah terwujud. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa walaupun bangsa Indonesia telah memproklamirkan dirinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai suatu bangsa yang merdeka terlepas dari belenggu penjajahan, masih ada wilayah yaitu Papua yang masih dipertahankan oleh Belanda melalui KMB tanggal 21 April 1956.



Melalui KMB Belanda ingin menjadikan Papua sebagai bagian dari wilayah kerajaan Belanda. Namun karena terdesak Belanda secara sepihak pada tanggal 5 April 1961 membentuk Dewan New Guinea. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1961, Belanda mendirikan Negara Papua Barat (West Papua) dengan lambang Negara "Burung Mambruk" dan Bendera Nasionalnya "Bintang Kejora" serta lagu kebangsaan "Hai Tanah Ku Papua". Pejabat West Papua orang asli Papua yang dipersiapkan melalui OSIBA (*Opleinding School voor Inheemse Bestuurs Amtenaren / Sekolah Pendidikan*

Pamong Praja Papua)⁴¹. Pada tanggal 19 Oktober 1961, Belanda membentuk Komite Nasional Papua yang anggotanya orang asli Papua. Dan pada tanggal 11 April 1969 pimpinan Herman Wayoi, Mozes Werror dan Clemens Runaweri bersama 200 orang yang kebanyakan pegawai negeri, pelajar dan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kediaman utusan khusus PBB untuk menyampaikan resolusi berjudul Penentuan Nasib Sendiri, ini merupakan demo pertama kali menentang pelaksanaan Pepera melalui sistem perwakilan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat. Mereka menegaskan harus menjalankan referendum untuk satu orang satu suara⁴². Keinginan yang tidak terpenuhi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab adanya gerakan disintegrasi bangsa yang memicu munculnya KKB hingga saat ini dan berkembang seiring dengan rendahnya imunitas masyarakat Papua juga menjadi indikator kondisi keamanan.

14. Apa Akibat Rendahnya Imunitas Masyarakat Papua Untuk Memperkokoh Integrasi Nasional.

Kondisi geografi yang sulit, terbatasnya akses transportasi, kurangnya tenaga pendidik/kesehatan dan masih adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB sangat mempengaruhi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah Pedalaman Papua dan Papua Barat.

a. Aspek Kesejahteraan.

Pembahasan sebelumnya disampaikan bahwa rendahnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data menunjukkan Provinsi Papua memiliki IPM terendah di seluruh Indonesia diikuti oleh Papua Barat terendah kedua. Sedangkan untuk Provinsi Papua dalam data IPM Kabupaten/Kota, terlihat Kabupaten Nduga memiliki IPM terendah pertama disusul terendah kedua adalah Kabupaten Puncak dan

⁴¹ [⁴² <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Papua_Barat /Diunduh pada tanggal 8-5-2020 pukul 21.05 WIB.](https://news.detik.com/berita/d-4345286/nicolaas jouwe muda bikin bintang kejora opm tua dukung nkri /Diunduh pada tanggal 8-5-2020 pukul 21.00 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=)

berikutnya beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah. Kesejahteraan dan keamanan seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan terutama di daerah Papua yang masih ada KKB. Kabupaten Nduga saat ini digunakan sebagai basis KKB yang melakukan aksi untuk memperjuangkan Papua Merdeka demikian juga dengan KKB yang berbasis di Kabupaten Puncak. Hal ini menunjukkan daerah yang memiliki IPM rendah, masyarakatnya mudah menerima keberadaan kelompok KKB di wilayahnya untuk menjadikan basis dalam melakukan penyerangan terhadap aparat TNI/Polri maupun masyarakat sipil dengan tujuan Papua Merdeka.

Masalah kesejahteraan juga dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan propaganda terutama untuk mempengaruhi masyarakat Papua dengan janji-janji peningkatan kesejahteraan bila Papua merdeka, serta dipakai sebagai alasan pbenaran terhadap adanya kejahan-kejahan kemanusiaan yang dilakukannya. Kondisi ini dimungkinkan untuk dilakukan karena ada dukungan dari masyarakat khususnya penduduk asli Papua, sebagai dampak dari kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, dan bila dibiarkan dukungan tersebut akan semakin besar terhadap KKB.

1) Pendidikan.

- a) Geografi. Kondisi geografi yang sulit menyebabkan Pemerintah Daerah tidak maksimal dalam penggunaan dana Otsus untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini terlihat dari peraturan daerah khusus (perdasus) yang telah memuat ketentuan penganggaran dana Otsus untuk pendidikan sebesar 30%, namun Kemenkeu mencatat rata-rata penggunaan dana untuk pendidikan hanya sebesar 25,4% begitu pula dengan Papua Barat, dana yang dianggarkan dalam perdasus 25% s.d 30% yang digunakan hanya 21,5% sehingga tidak mampu

mengejar ketinggalan pembangunan pendidikan dengan daerah lain⁴³.

Akibat lain dari kurang terpenuhi sarana/prasarana pendidikan berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah serta rendahnya angka melek huruf serta masih tingginya angka tuna aksara atau buta aksara. Kondisi ini mengakibatkan banyak sekali masyarakat Papua yang tidak mengetahui informasi yang sebenarnya, sehingga semua informasi yang masuk dianggap sebagai suatu kebenaran, walaupun informasi yang diberikan ada juga yang berasal dari pemerintah namun karena kurang intensitasnya maka kecil juga dampaknya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh KKB untuk menanamkan ide-ide kriminalnya dengan membangkitkan semangat nasionalisme Papua dengan dasar sejarah yang dibelokkan seperti seolah-olah negara Papua sudah ada tetapi diambil alih oleh Indonesia, hal ini membangkitkan semangat perrusuhan kepada pemerintah.

b) Transportasi. Akibat dari sulitnya transportasi dengan mahalnya biaya menjadi salah satu faktor penghambat kehadiran tenaga pendidik di daerah pedalaman. Padahal roh pendidikan sebenarnya terletak di pundak guru, baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidikan, pada kenyataannya ada di tangan guru sebab guru memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengukir peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas sesuai dengan tujuan pendidikan. Keberadaan guru sangat diperlukan dalam

⁴³ [https://nasional.kontan.co.id/news/penggunaan dana otsus papua untuk kesehatan dan pendidikan masih minim](https://nasional.kontan.co.id/news/penggunaan-dana-otsus-papua-untuk-kesehatan-dan-pendidikan-masih-minim) /Diunduh pada tanggal 15-5-2020 pukul 20.00 WIB.

kehidupan masyarakat, guru sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga para orang tua memberikan kepercayaan dengan menyerahkan anaknya untuk dididik.

- c) Tenaga Pendidik. Kekurangan tenaga pendidik di daerah-daerah pedalaman dan terpencil mengakibatkan proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan baik dan menyebabkan banyak anak-anak Papua yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Kondisi ini apabila berlangsung lama dan tidak segera diambil langkah-langkah strategis untuk menangani masalah kurangnya tenaga guru tersebut dapat dipastikan anak-anak Papua akan terbelenggu dalam lingkaran kebodohan. Kondisi ini merupakan lahan yang subur bagi kelompok KKB untuk mananamkan ide-ide separatisnya serta membangun nasionalisme Papua pada anak-anak Papua. Kondisi ini terlihat dengan adanya fakta anak-anak Papua yang seharusnya duduk di bangku sekolah namun bergabung dengan KKB untuk mengangkat senjata melawan pemerintah Indonesia.
- d) Kondisi keamanan wilayah. Kondisi keamanan wilayah yang tidak kondusif sangat berdampak pada psikologi pekerja yang akan membangun dan guru yang akan mendidik di pedalaman. Mereka tidak akan mau bekerja untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah pedalaman demikian juga dengan tenaga guru yang bertugas di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan terhambatnya pembangunan bidang pendidikan yang akan berpengaruh kepada penyiapan sumber daya manusia masyarakat Papua ke depan.

e) Dari uraian diatas terlihat bahwa kondisi geografi, transportasi dan tenaga guru sangat berpengaruh kepada pendidikan dan berdampak langsung terhadap rendahnya imunitas masyarakat Papua.

2) Kesehatan.

a) Geografi. Kondisi geografi juga menjadi penyebab Pemerintah Daerah tidak dapat memaksimalkan penggunaan dana Otsus untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini terlihat dari peraturan daerah khusus (perdasus) yang telah membuat ketentuan penganggaran dana Otsus untuk kesehatan sebesar 15%, namun Kemenkeu mencatat rata-rata penggunaan dana untuk kesehatan sebesar 18,7% begitu juga dengan Papua Barat dana yang dianggarkan dalam perdasus 10% s.d 15% yang digunakan hanya 13% sehingga tidak mampu mengejar ketinggalan pembangunan kesehatan dengan daerah lain⁴⁴.

b) Transportasi. Akibat dari transportasi yang terbatas berdampak kepada daerah-daerah yang terisolasi dan sulit dijangkau menyebabkan masyarakat di daerah tersebut tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009, hal ini berpengaruh terhadap proses pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

c) Tenaga kesehatan. Akibat dari kurangnya tenaga kesehatan akan berdampak langsung terhadap kerentanan masyarakat terhadap berbagai penyakit seperti yang pernah

⁴⁴ [https://nasional.kontan.co.id/news/penggunaan dana otsus papua untuk kesehatan dan pendidikan masih minim](https://nasional.kontan.co.id/news/penggunaan-dana-otsus-papua-untuk-kesehatan-dan-pendidikan-masih-minim) /Dunduh pada tanggal 15-5-2020 pukul 21.30 WIB.

terjadi di Wamena akibat dari wabah muntaber yang menyebabkan 100 orang meninggal dunia selain itu ada penyakit campak di Asmat dan kasus kekurangan gizi di Yahukimo⁴⁵. Hal ini akan berpengaruh terhadap angka rata-rata hidup masyarakat.

- d) Kondisi keamanan wilayah. Kondisi keamanan wilayah yang tidak kondusif sangat berdampak pada psikologi pekerja yang akan membangun dan tenaga kesehatan untuk memberi pelayanan kesehatan di daerah pedalaman. Mereka tidak akan mau bekerja untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan di daerah pedalaman demikian juga dengan tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan terhambatnya penyiapan sumber daya manusia masyarakat Papua ke depan.
- e) Dari uraian diatas terlihat bahwa kondisi geografi, transportasi dan tenaga kesehatan sangat berdampak pada rendahnya kualitas SDM sehingga merupakan suatu lahan yang subur bagi gerakan KKB untuk memanfaatkan kondisi ini sebagai isu untuk memojokkan pemerintah dalam penanganan kesehatan orang asli Papua. Rendahnya kualitas SDM berdampak pada mudahnya kelompok separatis Papua untuk memasukkan ide-ide KKB sekaligus mengajak generasi muda untuk bergerak melawan pemerintah Indonesia.

3) Ekonomi

- a) Geografi dan transportasi. Kondisi geografi dan transportasi menghambat program-program pembangunan infrastruktur yang

⁴⁵ <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-600/puskesmas-di-papua-masih-kekurangan-60-persen-tenaga-dokter.html> /Diuduh pada tanggal 22-5-2020 pukul 21.30 WIB.

sudah direncanakan oleh pemerintah untuk membuka daerah terisolasi. Pengaruh lain adalah ketahanan pangan masyarakat menjadi rendah akibat tingginya tingkat harga barang kebutuhan pokok (sembako) akan menambah kesulitan masyarakat tersebut. Kondisi ini juga bisa dijadikan bahan guna propaganda bagi KKB untuk menarik dukungan dari dunia internasional, dengan menjual keterbelakangan rakyat Papua yang berada di daerah pedalaman.

b) Sumber daya alam. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam mengolah potensi alam menyebabkan kemiskinan masyarakat di daerah pedalaman. Hal ini menjadi bahan bagi kelompok KKB dalam melakukan pergerakannya, melalui alasan kemiskinan tersebut mereka menyudutkan pemerintah pusat bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap orang asli Papua. Mereka menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah Indonesia hanya mau mengeruk kekayaan alam Papua saja, tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga masyarakat dibiarkan tetap berada di bawah kemiskinan.

c) Kondisi keamanan wilayah. Keamanan wilayah sangat mempengaruhi investor yang akan berinvestasi dan terlibat dalam pengembangan ekonomi daerah, termasuk pembangunan infrastruktur. Dengan adanya kejadian penembakan pekerja jalan trans Papua di Kabupaten Nduga, tidak ada lagi tenaga pekerja yang mau mengerjakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah pedalaman sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut.

b. Aspek Keamanan.

- 1) Sejarah. Saat ini KKB berupaya memanfaatkan isu-isu global tentang HAM dan Demokratisasi sebagai isu perjuangannya. Hal ini sangat efektif untuk mendapat perhatian dan simpati dari dunia Internasional. Dengan menggunakan teknologi komunikasi dan media massa, baik cetak maupun elektronika, persepsi sebagian masyarakat dunia terhadap masalah Papua berhasil di bentuk dan mendukung perjuangan KKB. Dari isu global tentang Demokratisasi dan HAM, KKB memformulasikan tiga isu perjuangan/trilogi perjuangan yaitu tinjau ulang Pepera 1969, tuntaskan pelanggaran HAM sejak 1961 sampai sekarang dan tingkatkan hak-hak dasar rakyat Papua dan kembalikan otonomi khusus Papua.
- 2) Gangguan Keamanan. Gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB berdampak terhadap rendahnya imunitas masyarakat. Dalam pembahasan ini penulis memisahkan KKB menjadi kelompok yaitu KKB bersenjata dan KKB politik.

- a) KKB bersenjata. Perjuangan KKB bersenjata pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mendukung perjuangan dari front politik. Manuver yang dilakukan menggunakan pola gerilya yaitu melakukan serangan dengan kekuatan kecil yang menyebar, seringkali mereka menyerang pos-pos TNI/Polri dengan kekuatan serta dengan disiplin tempur yang sangat lemah, setelah menyerang mereka meninggalkan tempat menuju daerah penyelaman atau basis operasi. Seringkali kegiatan penyerangan ini dilakukan bersamaan dengan momen-momen internasional maupun nasional dengan maksud menunjukan

eksistensinya terhadap dunia internasional. Sebagai salah satu contoh adalah kejadian penembakan terhadap pekerja dari PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga.

b) KKB politik. Perjuangan KKB politik ditujukan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat baik yang berada di dalam negeri maupun masyarakat dunia Internasional. Juga untuk mendapat dukungan politik pihak asing terutama dalam rangka mewujudkan suatu proses referendum guna memisahkan Papua dari NKRI. Kegiatan yang dilakukan selalu mengangkat isu negatif, pemutar balikan fakta, penyebaran selebaran gelap, seminar, aksi demo, dialog dan kampanye politik dengan mempolitisir kondisi sosial masyarakat yang sedang berkembang (peristiwa di Surabaya). Mereka juga selalu melakukan kegiatan diplomasi dengan bantuan negara-negara yang selama ini mendukung perjuangan mereka, seperti negara-negara kawasan Pasifik di antaranya Vanuatu dengan alasan kesamaan etnis Melanesia. Vanuatu bersama *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* seringkali mengangkat isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, dengan berbagai cara mereka berusaha masuk ke PBB dengan tujuan mendapatkan perhatian dari dunia internasional.

Gejala disintegrasi bangsa di wilayah Papua terlihat dengan adanya penolakan kehadiran negara di wilayah terjadinya konflik tersebut, negara hadir melalui aparatnya dalam hal ini TNI/Polri yang hadir dengan tujuan untuk memberikan adanya rasa aman terhadap masyarakat namun ditolak. Begitu juga dengan penolakan kehadiran pemerintah dalam upaya menyejahterakan rakyat melalui kegiatan pembangunan.

Penolakan tersebut sering kali disuarakan oleh kelompok KKB yang berhasil menghasut masyarakat untuk menyerukan agar pemerintah menarik kekuatan TNI dari tanah Papua dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dipelintir menjadi seolah-olah hanya untuk kepentingan operasi TNI.

15. Bagaimana menghilangkan Faktor Penyebab dan Akibat Rendahnya Imunitas Masyarakat Papua Untuk Memperkokoh Integrasi Nasional. Langkah strategi dalam penyelesaian ini tidak akan menyelesaikan konflik tersebut secara tuntas dalam arti matinya gerakan separatis untuk melepaskan diri dari NKRI, namun saran penyelesaian ini akan meningkatkan imunitas masyarakat Papua terhadap pengaruh KKB dengan mewujudkan SDM unggul dan pada akhirnya masyarakat benar-benar sadar sebagai bagian dari NKRI. Selanjutnya akan dibahas langkah-langkah penyelesaian dari aspek kesejahteraan dan aspek keamanan.

a. Aspek kesejahteraan.

Provinsi Papua dan Papua Barat sampai dengan tahun 2019 menduduki peringkat terakhir pertama dan kedua tingkat kesejahteraan sesuai data BPS tentang IPM Indonesia dalam penjelasan sebelumnya. Peningkatan kesejahteraan di Papua/Papua Barat dapat dilaksanakan dengan menerapkan teori "SWOT" yaitu memanfaatkan peluang dengan maksimal untuk mengatasi masalah atau hambatan yang ada. Artinya dapat memanfaatkan statusnya sebagai daerah otonomi khusus dimana dana otsus yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, dapat digunakan dengan maksimal guna mengejar ketertinggalan diberbagai bidang pembangunan. Dan memanfaatkan keberadaan TNI yang bertugas sampai kedaerah pedalaman Papua dan Papua Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan perlu upaya-upaya untuk menghilangkan faktor penghambat sebagai berikut:

1) Pendidikan.

- a) Geografi dan transportasi. Pemerintah harus menyiapkan sarana transportasi atau membangun infrastruktur jalan untuk memudahkan pengangkutan bahan-bahan bangunan yang akan digunakan untuk membangun sarana pendidikan. Ada peluang yang dapat digunakan seperti pesawat Hercules, Cassa, Helikopter yang digunakan TNI di Papua untuk memberi dukungan transportasi kepada satuan-satuan operasionalnya. Alutsista ini dapat meringankan biaya transportasi dan dapat menjangkau daerah pedalaman. Pembangunan sarana dan prasarana juga dapat menggunakan potensi hutan di daerah, seperti kayu merbau yang tumbuh di hutan Papua.
- b) Tenaga pendidik. Pemerintah berusaha mengatasi minimnya tenaga guru di daerah pedalaman melalui program-program untuk menurunkan guru di daerah-daerah pedalaman, di antaranya melalui program Guru Garis Depan (GGD). Melalui GGD, ini dilakukan pemerintah dengan merekrut tenaga guru secara khusus untuk ditempatkan di daerah pedalaman. Selain program yang dijalankan pemerintah ada juga program yang dilakukan oleh relawan di bidang pendidikan seperti Indonesia Mengajar. Selain itu pemanfaatan anggota TNI yang bertugas di daerah terpencil dan pedalaman sebagai tenaga guru juga merupakan salah satu langkah yang sangat baik.

Kepala Dinas Pendidikan Papua telah membuat kebijakan dalam pelibatan anggota TNI sebagai tenaga guru untuk membantu masyarakat di bidang pendidikan di Papua. Peran sebagai tenaga guru oleh anggota TNI tersebut sangat strategis, selain mengajarkan membaca menulis kepada para siswa dan

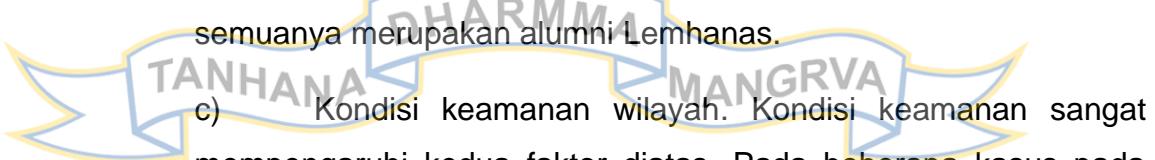
masyarakat, para tenaga guru dari TNI ini bisa berperan untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada para siswa dan masyarakat. Pemberian wawasan kebangsaan ini dapat menyadarkan masyarakat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Peran inilah sebenarnya yang ditakutkan oleh tokoh Papua Merdeka, mereka takut semangat kebangsaan Indonesia tertanam secara kuat di masyarakat Papua. Agar pemberdayaan anggota TNI di dunia pendidikan bisa berjalan efektif, perlu adanya kebijakan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan dengan Panglima TNI dalam satu MoU sehingga bidang pendidikan menjadi tugas lainnya bagi anggota Satgas TNI di wilayah pedalaman dan terpencil, sehingga TNI bisa menyiapkan SDM yang tangguh dalam mengatasi gangguan keamanan sekaligus mempunyai kemampuan sebagai guru.

Kebutuhan pembangunan SDM unggul yang berwawasan kebangsaan sekaligus memiliki intelektual yang tinggi agar mampu bersaing di era globalisasi memerlukan konsep pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional sekaligus mengembangkan kurikulum bela negara. Model pendidikan seperti ini telah diterapkan di beberapa lembaga pendidikan. Sebagai contoh SMA Negeri Taruna Nala di Jawa Timur, SMA Taruna Nusantara di Magelang, SMA Plus Soposurung di Sumatera Utara, dll. Lembaga pendidikan yang sudah ada ini dapat dimanfaatkan untuk membangun SDM Papua yang berwawasan kebangsaan melalui program beasiswa dari Kementerian Pendidikan untuk menjaring siswa berprestasi orang asli Papua dengan disekolahkan di sekolah berkurikulum bela negara yang di sebar di seluruh Indonesia. Keuntungan dari penempatan siswa berprestasi dari

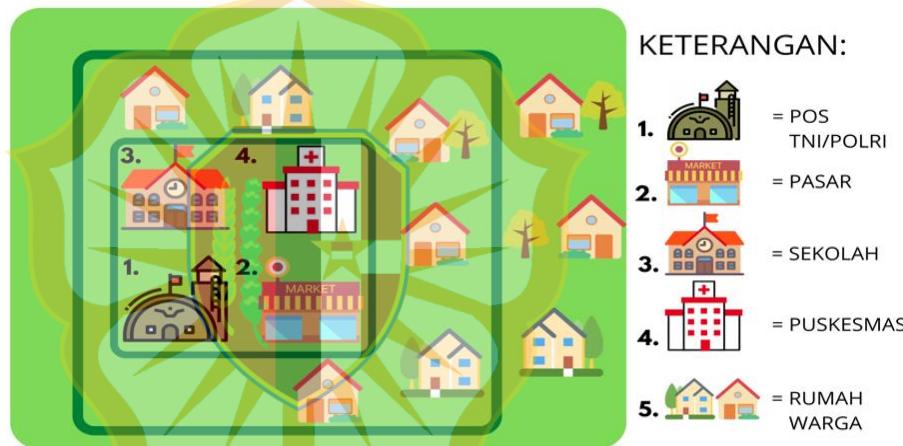
Papua sebagai calon pemimpin masa depan yang mempunyai wawasan kebangsaan Indonesia sekaligus terbentuk jaringan nasional antar siswa se-Nusantara dengan SDM unggul Papua yang dapat mengikat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan wawasan kebangsaan ini bukan hanya diperlukan untuk anak-anak tingkatan sekolah dan masyarakat saja, namun pendidikan ini juga perlu diberikan kepada para pejabat publik maupun calon pejabat agar memiliki semangat Nasionalisme Indonesia yang kuat. Pejabat negara di daerah diharapkan memiliki karakter berwawasan kebangsaan sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan, maupun pernyataannya akan sesuai dengan sumpah janjinya sebagai pejabat negara Indonesia pada saat pertama kali dilantik menjadi pejabat. Peran pendidikan wawasan kebangsaan bagi para pejabat maupun calon pejabat harus dilakukan oleh lembaga yang saat ini memiliki sumber daya di bidang pendidikan yang kualitasnya sangat tepat dalam membentuk karakter pemimpin bangsa. Lemhanas merupakan satu-satunya lembaga yang bisa mengambil peran ini, dalam arti Semua pejabat maupun pemimpin nasional di daerah diharapkan semuanya merupakan alumni Lemhanas.

- 
- c) Kondisi keamanan wilayah. Kondisi keamanan sangat mempengaruhi kedua faktor diatas. Pada beberapa kasus pada bab sebelumnya sudah dijelaskan akibat gangguan keamanan dapat mempengaruhi bidang pendidikan dan kesehatan. Upaya mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu (1) Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan aparat keamanan dibutuhkan dalam kondisi ini. Sinergitas antara pemerintah dengan aparat keamanan dapat dilakukan

melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. (2) Konsep pembangunan terintegrasi dapat diterapkan di Provinsi Papua/Papua Barat dengan pertimbangan kondisi geografi dan kondisi keamanan saat ini, dengan perencanaan yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Institusi TNI diharapkan sarana dan prasarana pendidikan di Papua/Papua Barat dapat dibangun dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh aparat TNI.

KONSEP PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DI DAERAH RAWAN



Gambar 3. Denah pembangunan terintegrasi

2) Kesehatan.

DHARMMA
TANAHAN MANGRVA

Permasalahan kesehatan mengalami kendala yang sama dengan masalah pendidikan meliputi faktor geografi, faktor kurangnya tenaga medis dan faktor gangguan keamanan. Sehingga upaya untuk menyelesaikan kendalanya bisa dilakukan dengan metoda yang sama yaitu memanfaatkan keberadaan TNI dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang terintegrasi.

Penyebaran tenaga medis yang tidak merata untuk tugas pelayanan kesehatan masyarakat dengan kesulitan geografi dan

pertimbangan keamanan bisa berkoordinasi dengan personil TNI/Polri dalam menjalankan tugas atau memanfaatkan Pos Satgas TNI yang memiliki tenaga kesehatan serta obat-obatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Personil TNI dapat memberikan pelayanan bagi kesehatan masyarakat di pos-pos TNI daerah terpencil/pedalaman. Perlu adanya kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pertahanan. Memperhatikan hal tersebut, TNI harus melengkapi kemampuan anggotanya, selain memiliki kemampuan kesehatan konvensional anggota TNI juga memanfaatkan potensi alam yang ada di Papua, selama ini hanya diberikan pengenalan tanaman liar yang bisa dimakan sebagai satu keterampilan dalam mempertahankan kehidupan di alam liar, saat ini harus dikenalkan tanaman yang tumbuh di hutan Papua dan bisa dimanfaatkan sebagai obat agar nantinya dapat membantu masyarakat.

3) Ekonomi

a) Geografi dan transportasi. Kondisi geografi dan transportasi menghambat program-program pembangunan infrastruktur di daerah pedalaman. Hal ini harus dihilangkan dengan membangun koneksi sampai ke daerah-daerah pedalaman dengan menambah sarana transportasi, menambah bandara udara dan membangun infrastruktur jalan sampai ke daerah penggunaan dan pelabuhan laut untuk daerah pesisir. Disamping itu pemerintah daerah juga bisa bekerjasama dengan TNI untuk menggunakan alutsita dan personil TNI yang ada di daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat pedalaman.

b) Sumber daya alam. Peningkatan ekonomi akan cepat terwujud bila ada sinergitas antara akademisi, pengusaha,

masyarakat, media dan pemerintah (gagasan *Penta Helix*). Daerah di Papua memiliki potensi alam sangat menjanjikan, lingkungan yang dikelilingi oleh hutan dengan pemandangan bukit, sungai dan laut yang indah berpotensi menjadi kawasan wisata, bila diolah dengan baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi lain adalah keanekaragaman flora yang bisa dibudidayakan dengan mudah karena tidak membutuhkan penanganan yang rumit seperti buah merah. Buah merah saat ini memiliki nilai ekonomis karena di kenal sebagai obat herbal yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Daerah Papua juga memiliki potensi budidaya padi, jagung, ubi jalar, kopi, jeruk, kayu gaharu dan lain-lain. Dengan melibatkan akademisi guna pengkajian dalam pengembangan sesuai dengan sumber daya yang ada di daerah. Selanjutnya dengan menggunakan teknologi yang cocok potensi alam dapat ditingkatkan. Hasil budidaya yang berkualitas dapat menjadi komoditas pasar dan akan menarik investor. Peranan media massa sangat penting untuk mempromosikan keunggulan potensi alam daerah. Pemerintah melibatkan rakyat melalui lembaga-lembaga adat di Papua, sehingga di masa mendatang tidak ada lagi penduduk yang kekurangan pangan hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat. Dengan terpenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan. Semakin baik tingkat pendidikan akan mendukung sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing dalam memenuhi lapangan kerja sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan di Papua.

- c) Kondisi keamanan wilayah. Kondisi keamanan sangat mempengaruhi kehadiran investor untuk ikut membangun infrastruktur atau terlibat dalam mengembangkan perekonomian daerah. Upaya mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu (1) Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan aparat keamanan dalam pembangunan infrastruktur. (2) Konsep pembangunan terintegrasi dapat diterapkan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan pertimbangan kondisi geografi dan kondisi keamanan saat ini, dengan perencanaan yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Institusi TNI diharapkan program pembangunan sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat dapat terlaksana dengan aman.
- b. Aspek keamanan.
- 1) Sejarah.
- Upaya menghilangkan isu pelurusan sejarah (Pepera) integrasi Papua dapat menggunakan teori manajemen konflik dengan pendekatan ACES (*Asses the Situation, Clarify the issues, Evaluate Alternative Approaches, Solve the problem*) atau mengenali situasi, memperjelas permasalahan, mengevaluasi melalui pendekatan-pendekatan alternatif, memecahkan permasalahan. Pendekatan ini bisa di implementasikan di Papua karena ada perbedaan pendapat tentang integrasi bangsa, sebaiknya situasi/kondisi ini tidak di biarkan berlarut-larut. Kita harus berusaha memperkecil perbedaan tersebut dengan membuka komunikasi melalui diskusi untuk memperjelas perbedaan tersebut agar konflik tidak memasuki tahap selanjutnya. Upaya melalui diskusi masih dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dengan melibatkan tokoh-tokoh politik Papua

yang memiliki pandangan nasionalisme separatis (terdidik) dan tokoh Papua yang sudah menerima nasionalisme bangsa Indonesia.

Diskusi ini dilaksanakan untuk memahami perbedaan pandangan tentang integrasi Papua, dalam forum diskusi disampaikan fakta sejarah tentang integrasi Papua ke dalam NKRI sesuai dengan *New York agreement* 1962. Setelah mengetahui perbedaan kemudian di urai berbagai permasalahan hasil diskusi untuk dikembangkan dengan mengambil langkah-langkah yang efektif guna memutus regenerasi yang dilakukan oleh KKB kepada generasi selanjutnya.

Langkah-langkah efektif yang dimaksud bisa dilaksanakan oleh beberapa lembaga sesuai dengan fungsinya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memasukan kembali mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB) ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Kementerian Pertahanan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bela negara melalui program pendidikan non formal. Badan Intelejen Negara dan intelejen terkait di daerah Papua dapat merekrut tokoh berpengaruh untuk dijadikan agen guna penggalangan selanjutnya. Diharapkan dengan dilaksanakan secara terus menerus akan memberi kesadaran kepada masyarakat tentang sejarah perjuangan bangsa dan pada akhirnya sadar sebagai bagian dari NKRI.

- 2) Ketahanan Nasional menurut Harjomataram adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Dalam hal ini separatis merupakan ancaman dari dalam juga berusaha mencari perhatian internasional dengan mengangkat isu pelanggaran HAM. Sehingga penanganan KKB harus didasarkan pada

aspek legalitas hukum dan peraturan perundangan (UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI) serta kebijakan Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan permasalahan Papua, sebagai barometer pelaksanaannya. Guna menghindari tekanan politik terhadap pemerintah dan TNI khususnya. Maka Konsep yang digunakan adalah “*Smart Power*” yaitu penggunaan *Soft Power* dan *Hard Power* secara cerdas disesuaikan dengan kondisi wilayah. Dengan menggunakan Pendekatan Agama (*Religious approach*), pendekatan Budaya (*Cultural approach*) dan Pendekatan Kesetaraan (*Equality approach*).

a) Kelompok kriminal bersenjata.

Konsep dalam mengatasi KKB adalah mengedepankan *Hard Power* didukung dengan *Soft Power*. Dalam mengatasi KKB dilaksanakan dengan menggelar operasi intelijen, menggelar operasi teritorial dan menyiapkan operasi tempur.

Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman KKB yang mengganggu jalannya pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

b) Kelompok kriminal front politik.

Pada prinsipnya kelompok kriminal front politik memiliki pola operasi yaitu berusaha mendapat dukungan dari rakyat guna mencapai tujuan politiknya. dikarenakan kekuatan KKB akan semakin besar dengan adanya dukungan rakyat baik dukungan personil maupun dukungan logistik. Untuk itu, personil TNI/Polri harus dapat meningkatkan keuletan dan daya tahan masyarakat terhadap pengaruh idiosiologi KKB.

Mencermati teori gerilya tersebut maka konsep yang digunakan adalah “*Soft power*”. Pendekatan agama (*religius approach*) dimaknai bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat pada dasarnya merupakan masyarakat yang agamis, dan taat akan ajaran-ajaran ketuhanan yang mencerminkan ketulusan akan kasih sayang sesama umat, sehingga Papua akan damai karena tidak ada satu agama pun yang menganjurkan permusuhan di antara sesama. Pendekatan ini memanfaatkan media agama dengan melihat tipologi masyarakat Papua yang sebagian besar memiliki ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin agamanya. Pendekatan budaya (*cultural approach*) yang memandang bahwa budaya masyarakat Papua merupakan bagian dari kehidupan yang berkembang dan dimiliki bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul. Melalui pendekatan budaya ini akan dapat disampaikan pesan-pesan persaudaraan, persatuhan dan kesatuan bangsa, sopan santun dan etika serta pesan tidak saling memusuhi sehingga dapat digunakan untuk mengubah mindset berpikirnya.



Pendekatan kesetaraan (*equality approach*) yang dimaknai dengan adanya persamaan perlakuan pada setiap anak bangsa Indonesia, menuntut bahwa pada dasarnya masyarakat Papua merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang harus mendapatkan perlakuan yang setara dengan masyarakat Indonesia lainnya, baik dalam hal pendidikan, kesehatan maupun pembangunannya. Siapapun orang Papua mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara guna membangun Papua. Setiap manusia memiliki hak azasi yang melekat pada diri masing-masing, demikian juga halnya dengan masyarakat Papua. Melalui pendekatan kesetaraan ini maka permasalahan keadilan dapat tereliminir. Dengan tiga pendekatan ini diharapkan akan mampu memenangkan hati rakyat Papua artinya menurut Nasution dalam konsep gerilya bahwa kemenangan yang sesungguhnya dalam konflik adalah memenangkan hati rakyat dalam hal ini rakyat sadar sebagai bagian dari NKRI.

Selain upaya internal diatas diperlukan juga upaya external untuk menghilangkan pengaruh KKB di luar negeri melalui diplomasi luar negeri dengan memanfaatkan peluang (Teori SWOT) yaitu penolakan terhadap Benny Wenda untuk masuk ke ruang sidang umum PBB melalui delegasi Vanuatu. Peran ini perlu dilakukan untuk mencegah upaya negara Vanuatu bersama *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang selalu berupaya mengangkat isu HAM di Papua untuk mendiskreditkan Indonesia di dunia internasional. Sehingga diperlukan peningkatan peran diplomasi untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara Vanuatu dan negara-negara lainnya di kawasan Pasifik. Untuk memaksimalkan hubungan baik dengan negara Vanuatu serta menjaga kepentingan nasional Indonesia di kawasan Pasifik sebaiknya ditempatkan perwakilan Kedutaan Besar RI di negara Vanuatu.

Memberdayakan peran serta orang asli Papua sebagai bagian dari diplomasi Indonesia baik sebagai diplomat dalam pertemuan internasional maupun sebagai pejabat Duta Besar dapat merubah pandangan internasional tentang konflik Papua

yang selama ini dianggap merupakan konflik horizontal antara rakyat Papua dengan pemerintah Republik Indonesia akan berubah menjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok orang yang mengganggu kehidupan masyarakat Papua. Sehingga negara memberikan respons dalam rangka melindungi warga negaranya dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal.



BAB IV

PENUTUP

16. **Simpulan.** Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

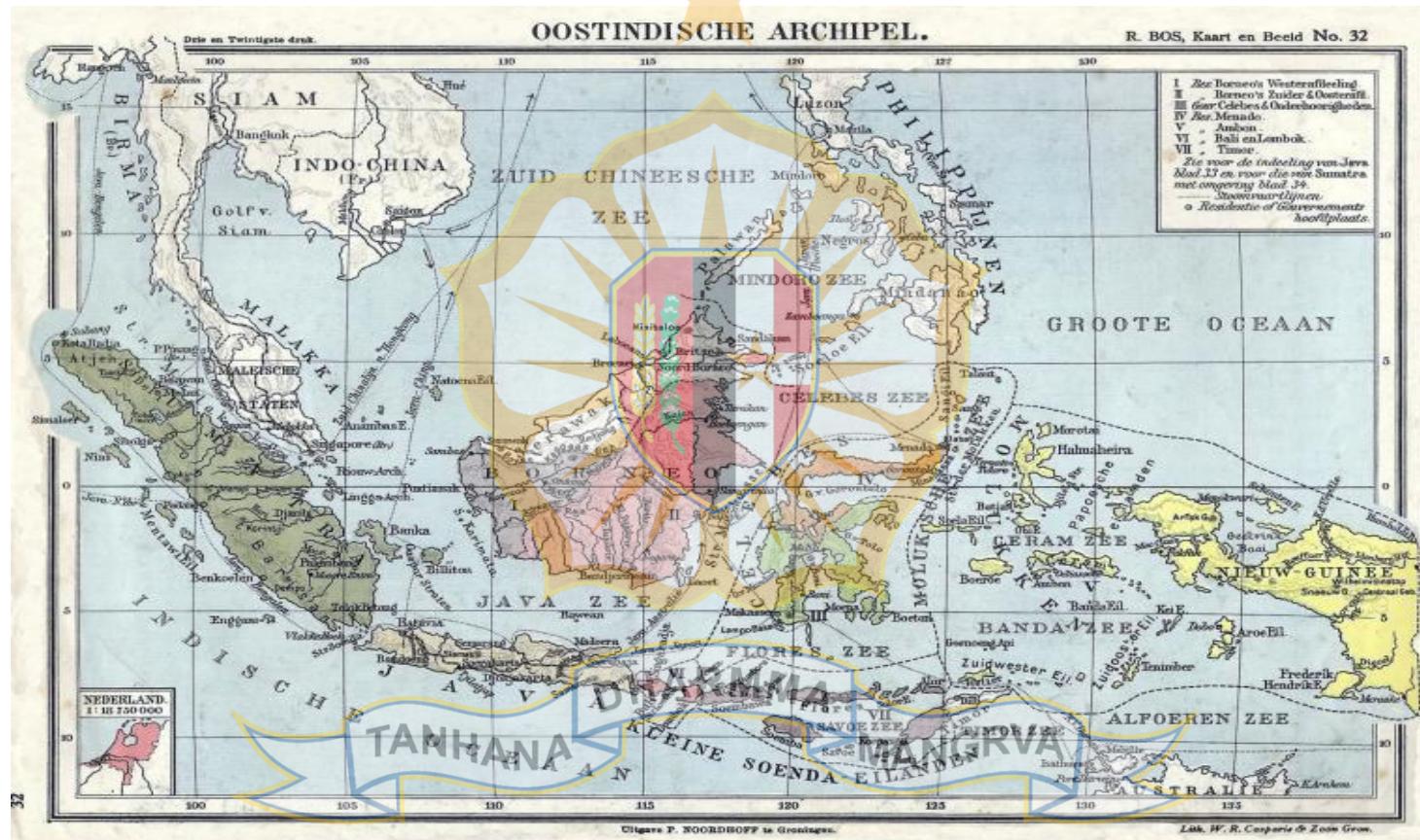
- a. Penyebab rendahnya imunitas masyarakat Papua karena pengolahan dana Otsus yang belum maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti kurangnya pembangunan sarana/prasarana, pendidikan, kesehatan dan ekonomi akibat sulitnya kondisi geografi, terbatasnya sarana/prasarana transportasi, keterbatasan tenaga pendidik dan kesehatan serta masih belum maksimal dalam pengolahan sumber daya alam di daerah. Gangguan keamanan di Papua akibat bom waktu yang ditinggalkan Belanda juga menjadi salah satu penyebab rendahnya imunitas masyarakat Papua.
- b. **Aspek kesejahteraan.** Untuk membangun imunitas masyarakat Papua maka perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus melibatkan berbagai komponen bangsa di antaranya pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, media dan TNI, masing-masing komponen memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Upaya yang dilakukan melalui strategi yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh KKB untuk memperkokoh integrasi nasional baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Beberapa metoda/cara yang di gunakan antara lain : edukasi, penelitian, aplikasi, publikasi, perlibatan, pelatihan dan pembangunan terintegrasi. Adapun sarana yang dapat digunakan antara lain : pemanfaatan alat utama sistem persenjataan dan personil TNI, melibatkan perguruan tinggi, pengusaha, media massa, masyarakat, pemerintah dan potensi alam yang tersedia.
- c. **Aspek keamanan.** Pengelolaan gangguan keamanan dilakukan melalui tindakan *smart power* dengan menggunakan *hard power* dan *soft power*.

Untuk itu diperlukan strategi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metoda yang di gunakan antara lain : diskusi, pendekatan agama (*Religious approach*), budaya (*Cultural approach*) dan kesetaraan (*Equality approach*). Sarana yang digunakan adalah TNI, kepolisian, masyarakat dan pemerintah.

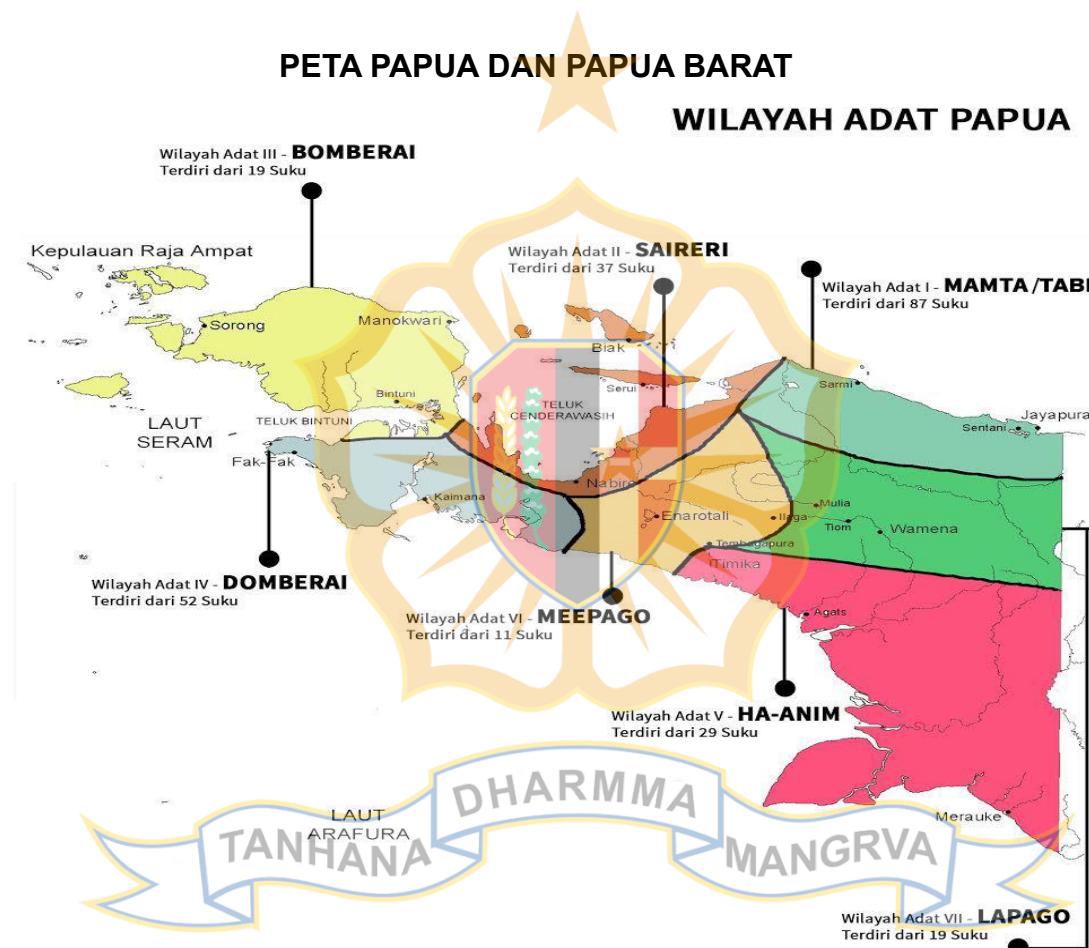


LAMPIRAN - 2a " PETA INDONESIA (HINDIA BELANDA)"

PETA INDONESIA (HINDIA BELANDA)



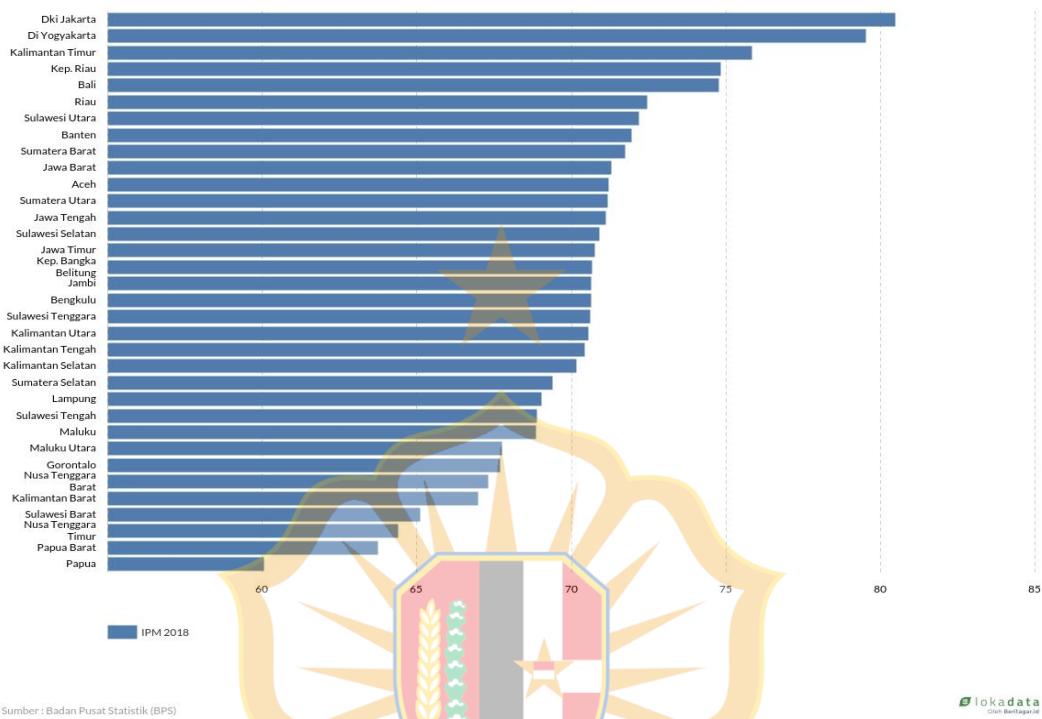
LAMPIRAN - 2b "PETA PAPUA DAN PAPUA BARAT"



LAMPIRAN – 2c “GRAFIK IPM PROVINSI TH. 2018”
“PETA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI
PAPUA”

GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TH. 2018

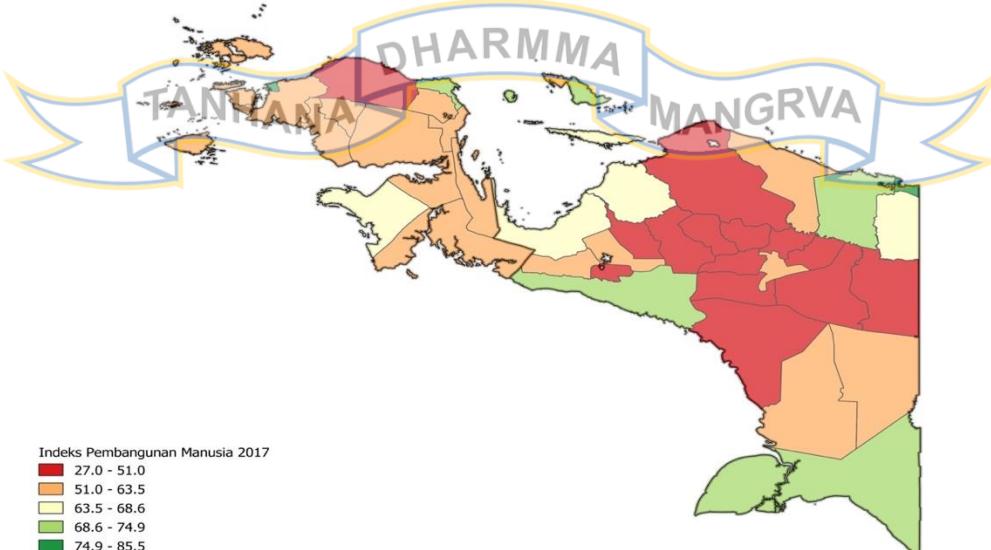
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut provinsi, 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

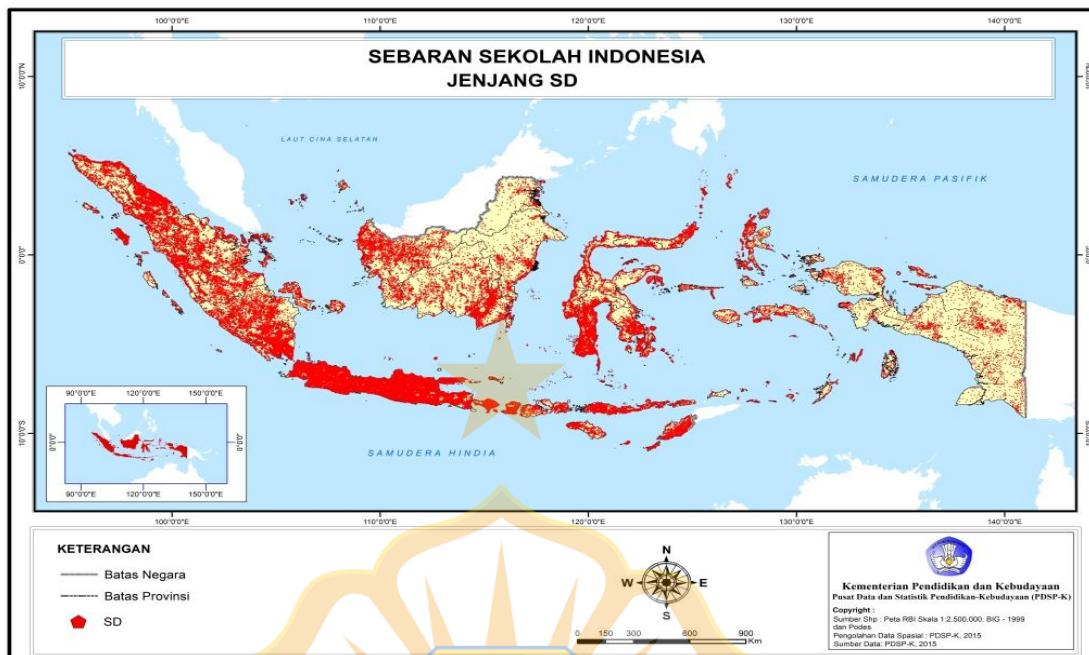
 lokadata
GloB BeritaGrafid

PETA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA

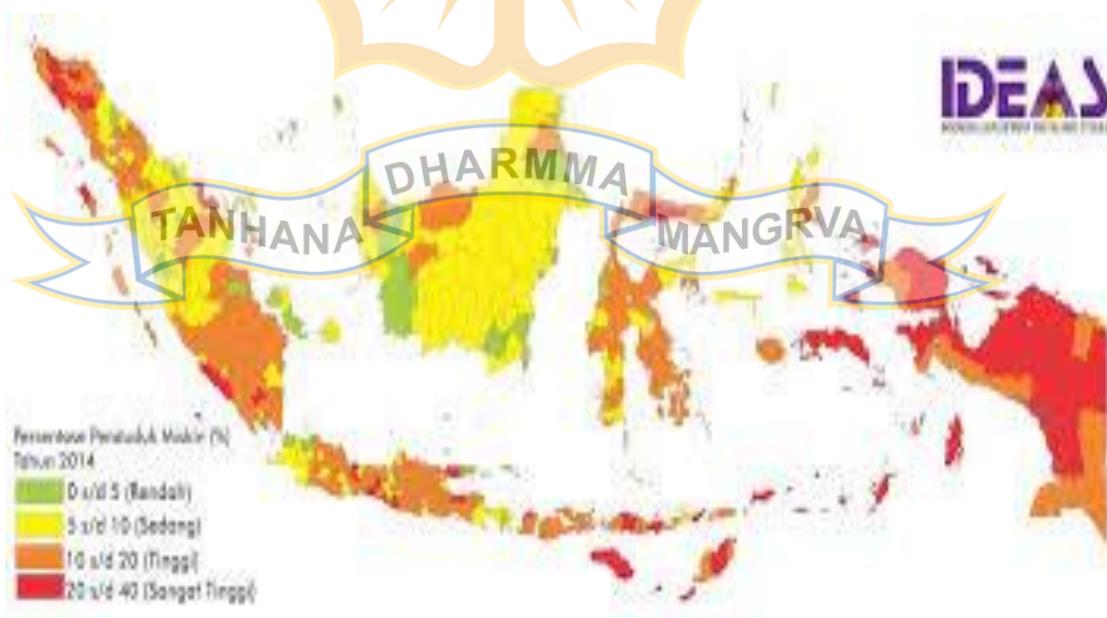


LAMPIRAN - 2d "PETA SEBARAN SEKOLAH DI INDONESIA"
"PETA RENCANA PEMBANGUNAN KESEHATAN"

PETA SEBARAN SEKOLAH DI INDONESIA



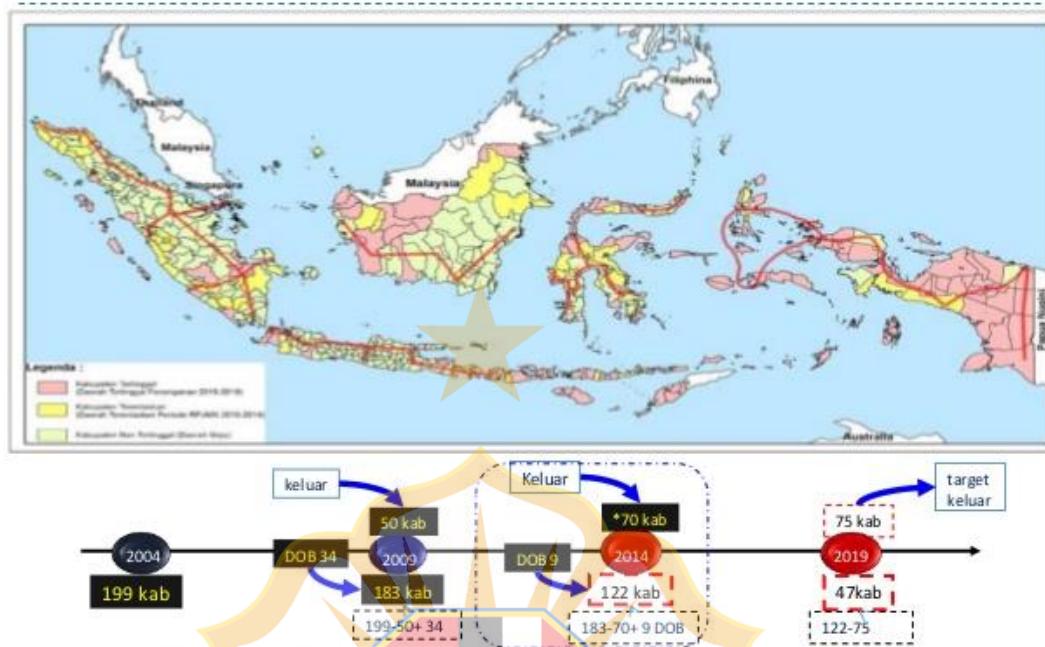
PETA RENCANA PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN 2015-2019



LAMPIRAN – 2e “PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL”
“PETA TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA”



PETA PERSEBARAN DAN
PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL
(SEBAGAI BASIS ANALISIS SPASIAL SINERGI WILAYAH)



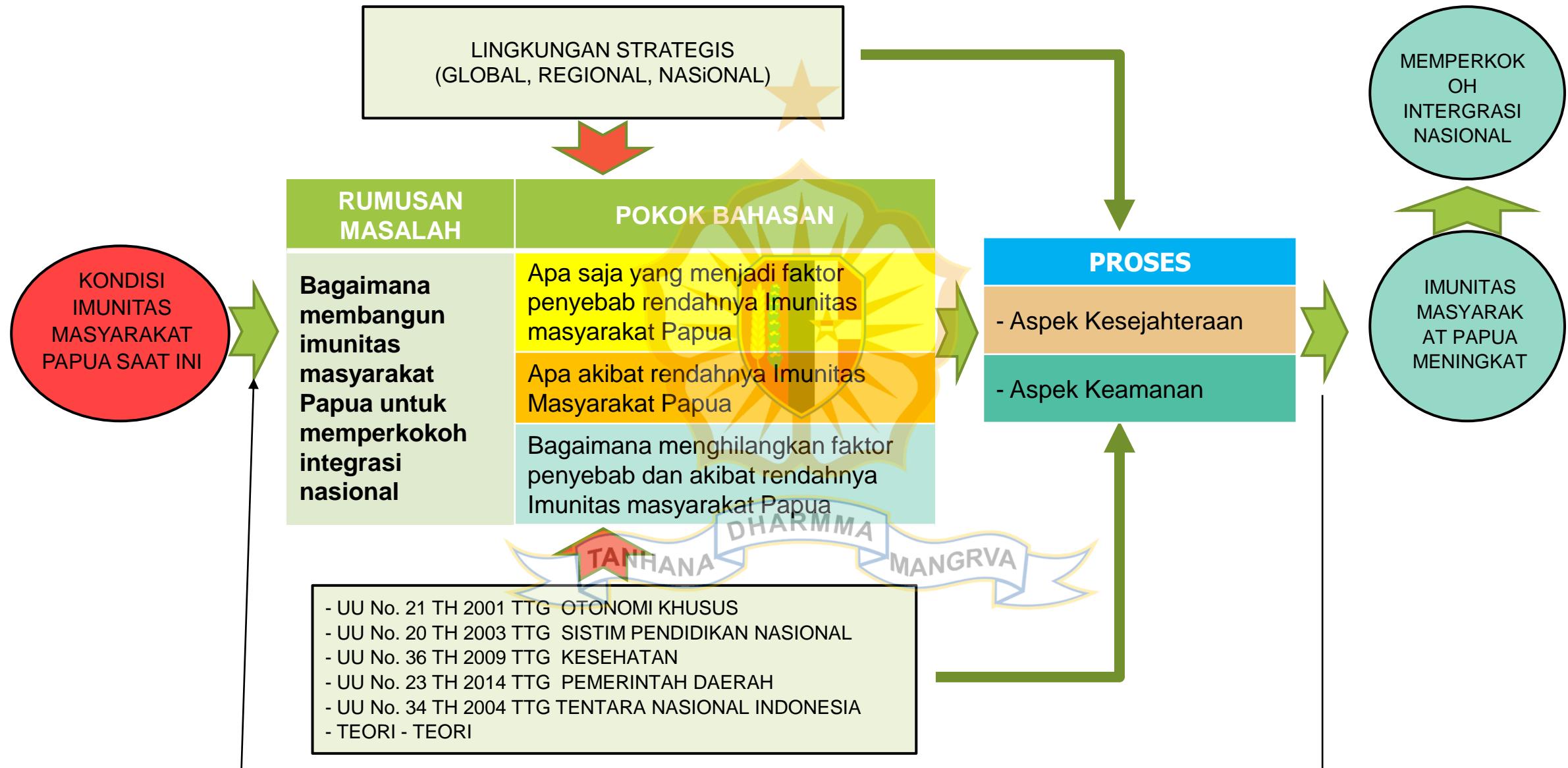
48

PETA TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA
TAHUN 2015



ALUR PIKIR

LAMPIRAN -1 "ALUR PIKIR"



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA : Frenky E. Riupassa, S.Sos., M.Han.
2. PANGKAT/KORPS : Kolonel Infanteri
3. NRP : 1900012710768
4. JABATAN : Pamen Denma Mabesad
5. TEMPAT TGL LAHIR : Ambon, 6 Juli 1968
6. RIWAYAT JABATAN :
 - a. Danton, Danki dan Pasiops Yonif 123/RW Dam I/BB
 - b. Pasiops Dim 0316 Batam Dam I/BB
 - c. Gumlil Gol VI Depstaf Pusdikif
 - d. Kasi Pam/ops Pusdikif
 - e. Dankelas Satdik Selapaif Pusdikif
 - f. Pamen Pussenif (Dik Seskoad)
 - g. Pabandya Lat Dam XVII/Cenderawasih
 - h. Danyonif 755/Yalet Dam XVII/Cenderawasih
 - i. Dan Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih
 - j. Dandim 1705/Paniai Dam XVII/Cenderawasih
 - k. Waasops Kasdam XVII/Cenderawasih
 - l. Asops Kasdam XVII/Cenderawasih
 - m. Sahli Bid Ekonomi Pangdam XVII /Cenderawasih
 - n. Pamen Denma Mabesad (Dik Sesko TNI)
 - o. Kasrem 091/ASN Dam VI/Mulawarman
 - p. Inspektur Kodam XVIII/Kasuari
 - q. Pamen Denma Mabesad (PPRA 60 Lemhannas RI)

9. RIWAYAT PENDIDIKAN.

a. Dikum.

- 1) SD TH 1980
- 2) SMP TH 1984
- 3) SMA TH 1987
- 4) S-1 TH 1997
- 5) S-2 TH 2018



b. Dikmil

- 1) Akmil TH 1990
- 2) Suslapa – I If TH 1997
- 3) Selapa If TH 2000
- 4) Seskoad TH 2004
- 5) Susdanyon TH 2006
- 6) Susdandim TH 2008
- 7) Sesko TNI TH 2016

